



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

IV

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

LAMPIRAN

I.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	Buku I
II.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD	Buku I
III.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT	Buku I
IV.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH	Buku I
IV. A	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Buku I
IV. B	DINAS KESEHATAN	Buku I
IV. C	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Buku I
IV. D	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Buku I
IV. E	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Buku II
IV. F	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Buku II
IV. G	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Buku II
IV. H	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Buku II
IV. I	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Buku II
IV. J	DINAS PERHUBUNGAN	Buku II
IV. K	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Buku III
IV. L	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Buku III
IV. M	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Buku III
IV. N	DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Buku III
IV. O	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,	Buku III

	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
IV. P	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ ANNA LASMANAH	Buku III
V.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH	
V. A	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Buku IV
V. B	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Buku IV
V. C	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Buku IV
V. D	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Buku IV
V. E	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Buku IV
VI	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	
VI. A	KECAMATAN BANJARNEGARA	Buku Va
VI. B	KECAMATAN BAWANG	Buku Va
VI. C	KECAMATAN MADUKARA	Buku Va
VI. D	KECAMATAN SIGALUH	Buku Va
VI. E	KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK	Buku Va
VI. F	KECAMATAN SUSUKAN	Buku Va
VI. G	KECAMATAN MANDIRAJA	Buku Va
VI. H	KECAMATAN PURWANEGARA	Buku Va
VI. I	KECAMATAN WANADADI	Buku Va
VI. J	KECAMATAN BANJARMANGU	Buku Va
VI. K	KECAMATAN RAKIT	Buku Vb
VI. L	KECAMATAN PUNGCELAN	Buku Vb
VI. M	KECAMATAN KARANGKOBAR	Buku Vb
VI. N	KECAMATAN WANAYASA	Buku Vb
VI. O	KECAMATAN KALIBENING	Buku Vb
VI. P	KECAMATAN BATUR	Buku Vb
VI. Q	KECAMATAN PAGENTAN	Buku Vb
VI. R	KECAMATAN PEJAWARAN	Buku Vb
VI. S	KECAMATAN PAGEDONGAN	Buku Vb
VI. T	KECAMATAN PANDANARUM	Buku Vb



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

- a. menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024; dan
- b. sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP.

Pasal 4

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 59

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

RENCANA KERJA

BAPERLITBANG TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat

daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

- Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 70);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026

(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;

- b. sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024; dan
- c. menjadikan media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2023.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPERLITBANG TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Baperlitbang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Baperlitbang.

Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Baperlitbang. Urusan yang menjadi kewenangan Baperlitbang adalah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

Renja Baperlitbang Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.5.153.001.989,- (lima milyar seratus lima puluh tiga juta seribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan fokus utama pada optimalisasi pembangunan daerah diseluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, yaitu melambatnya pertumbuhan sektor perdagangan di tiga tahun terakhir dari 8,01% di tahun 2016 melambat ke 6,154 di tahun 2019.

Dari 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dalam Renja Baperlitbang tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 (empat) program, 13 (tiga belas)

kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran (termasuk anggaran gaji dan tunjangan ASN) sebesar Rp. 6.870.666.674,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pada Perubahan Renja Baperlitbang Tahun Anggaran 2022, terjadi refocusing serta pergeseran anggaran. Beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Baperlitbang, tapi tetap dengan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.047.783.894,- (enam milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah). Pada Perubahan Renja Baperlitbang tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah/ berkurang, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan;
 - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - 1) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:
 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi sub kegiatan:
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA, meliputi sub kegiatan :

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, meliputi kegiatan :
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
 - b. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan semua pencapaian target sesuai rencana.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka tetap perlu ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan rencana kerja, diantaranya:

1. Menyusun perencanaan yang tepat berdasarkan permasalahan yang ada dan merupakan prioritas.
2. Meningkatkan kerjasama dengan sekolah, lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong inovasi dari masyarakat.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Baperlitbang dan Pencapaian Renstra Baperlitbang sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2023* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (2022)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.01	URUSAN PERENCANAAN									
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,23	85	85,23	100%	85,2	85,2	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%

		SKPD								
	Kegiatan Adminastrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersediannya Honr Pengelola Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dok pelaporan keuangan semesteran dan tahunan	2 dok	-	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedainya Bahan Logistik dan terfasilitasinya perjalanan dinas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%

		pemerintah daerah								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarpras pendukung kinerja pegawai	-	5 komputer/PC, 1 kamera zoom, 4 printer, 2 kamera cctv, 6 microphone	-	-	-	2 hardisk eksternal, 8 Laptop, 1 penghancur kertas, 2 AC, 2 printer, 1 tv panel	2 hardisk eksternal, 8 Laptop, 1 penghancur kertas, 2 AC, 2 printer, 1 tv panel	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Listrik Air dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor PTT dan THL	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya, Pajak Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%

		Kantor								
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Terpeliharanya Sarana dan prasarana Gedung Kantordan Bangunan lainnya</i>	1 Tahun	1 Tahun	<i>1 Tahun</i>	<i>1 Tahun</i>	100%	<i>1 Tahun</i>	<i>1 Tahun</i>	100%
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD/RPJM D/RKPD yang telah ditetapkan	2 Dok	1 dok	2 dok	2 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase terlaksananya penyusunan perencanaan dan pendanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	-	1 berita acara	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten atau Kota	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang	-	1 berita acara	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten atau Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)	2 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Persentase terlaksananya analisis data dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pembangunan Daerah	informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah								
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 dok	3 dok	3 Dok	3 Dok	100%	23Dok	3 Dok	100%
	Pembinaan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan SIPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	-	-	-
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monev DAK	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	-	-	-

5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD	>90%	100%	>90%	100%	100%	>90%	100%	100%
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD	>90%	100%	>90%	100%	100%	>90%	100%	100%
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD	>90%	100%	>90%	100%	100%	>90%	100%	100%
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

	RPJPD,RPJMD,RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Berita Acara desk penyusunan Renja bidang pemerintahan	-	1 dok	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya movev bidang pemerintahan	-	1 tahun	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	1 tahun	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD,RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Berita Acara desk penyusunan Renja bidang Pembangunan Manusia	-	1 dok	-	-	-	-	-	-

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya monev bidang Pembangunan Manusia	-	1 tahun	-	-	-	-	-	-
5.01.3.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Prosentase Perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Berita Acara desk penyusunan Renja bidang Perekonomian, <i>Penyusunan dokumen rencana pengembangan klaster ekonomi</i>	-	1 dok	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan</i>	4 OPD	1 dok	4 OPD	4 OPD	100%	4 OPD	4 OPD	100%

	Perekonomian	<i>Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</i>								
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD,RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i>	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA</i>	-	-	-	-	-	4 OPD	4 OPD	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD</i>	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%

		<i>pada Bidang SDA</i>								
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD,RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Berita Acara desk penyusunan Renja bidang Infrastruktur, penyusunan dok rencana infrastruktur	-	1 dok	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</i>	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen	<i>Jumlah Dokumen</i>	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD,RKPD)	<i>Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i>								
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Berita Acara desk penyusunan Renja bidang Kewilayahan, Tersedianya dokumen sektoral jangka menengah bidang kewilayahan	-	1 dok	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan hasil monev bidang Kewilayahan	-	1 dok	-	-	-	-	-	-
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	<i>Prosentase Peningkatan riset dan inovasi daerah/ Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan</i>	2 %	2%	2 %	2%	100%	20%	20%	100%
	Kegiatan Penelitian dan	<i>Jumlah</i>						1 dok	1 dok	100%

	Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Induk Kelitbang	-	1 dok	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						2 Dok	2 Dok	100%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Tersusunnya dokumen RPKD/kajian kemiskinan	-	1 dok	-	-	-	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						2 Dok	2 Dok	100%
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi,	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%

		Usaha Kecil dan Menengah								
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi						2 Dok	2 Dok	100%
	Penelitian , Pengembangan dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil kelitbangan	Laporan hasil fasilitasi Kegiatan Indeks daya saing Daerah	-	1 dok	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Baperlitbang

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara mengampu 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. meningkatnya pengembangan riset dan inovasi daerah,
2. meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik,
3. meningkatnya kinerja dan kualitas dokumen perencanaan,
4. meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, dan
5. meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Dari 5 (lima) indikator tersebut, seluruh indikator berstatus tercapai. Pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Pandemi Covid-19 yang memasuki tahun ketiga berpengaruh terhadap capaian kinerja yang melibatkan masyarakat secara luas, seperti pelaku usaha ekonomi, perguruan tinggi, organisasi, stakeholder vertikal dan sektoral yang menjadi mitra Baperlitbang dalam pencapaian sasaran kinerja 2022.

Baperlitbang Kabupaten Bajarneegara bukan merupakan Perangkat Daerah pengampu SPM maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD, sehingga pencapaian kinerjanya tidak diukur melalui pencapaian SPM, tetapi hanya mengacu pada target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Baperlitbang Kabupaten Bajarneegara.

Kinerja pelayanan Baperlitbang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	N I H I L											

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Baperlitbang

Baperlitbang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 (dua) urusan, yaitu urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 2 (dua) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Baperlitbang diantaranya adalah:

1. Tidak adanya inventarisasi dan tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian yang bisa dijadikan pijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional Perencana dan Peneliti yang memadai.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi penghambat (*constraint*) dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Penyusunan program dan penganggaran tidak berdasarkan kajian sehingga efektivitas dan efisiensinya belum terukur.
2. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara kurang optimal.

Tidak *dapat* dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi

pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Baperlitbang, yaitu:

1. Banyaknya peraturan yang harus dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya tuntutan penyediaan dokumen perencanaan yang inovatif, kreatif dan aplikatif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk lebih terlibat dan mendapatkan akses terhadap informasi pembangunan daerah.
4. Adanya persaingan antar daerah baik regional maupun nasional dalam mengembangkan potensi daerah.
5. Tuntutan akan konsistensi antar dokumen perencanaan baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dengan perangkat daerah.
6. Pemenuhan terhadap pemecahan masalah daerah yang membutuhkan sumber-sumber pendanaan alternatif diluar APBD Kabupaten Banjarnegara yang sangat kompetitif.

Berikut ini adalah peluang bagi pengembangan pelayanan Baperlitbang pada lima tahun mendatang.

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pedoman perencanaan pembangunan di daerah cepat berkembang.
2. Berkembangnya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penyediaan data dan informasi.

3. Potensi pembiayaan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta, NGO maupun lembaga donor yang makin terbuka sebagai akibat dari penerapan SDG's.
4. Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga memicu para perencana untuk menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi kepada pemecahan masalah.
5. Kesempatan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah di tingkat regional, seperti BARLINGMASCAKEB semakin intens.
6. Peran CSR yang makin menguat dalam mendukung pemecahan permasalahan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
7. Meningkatnya peran perguruan tinggi sebagai mitra di dalam penelitian dan pengembangan.

Semakin kompleksnya permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang maka pembangunan daerah yang membutuhkan pemecahan melalui kajian, penelitian dan pengembangan semakin banyak. Sehingga dapat diinventarisir isu-isu strategis yang ada, yang didapat dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Baperlitbang pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan multi sektor di bidang ekonomi.

3. Belum optimalnya perencanaan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
4. Belum optimalnya perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan.
6. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM serta sarana prasarana penunjang kinerja Baperlitbang.
7. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan Baperlitbang dalam penyusunan program dan kegiatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Baperlitbang pada tahun 2024 meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan;
 - b. Penguatan lembaga pendidikan nonformal;
 - c. Meningkatkan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - d. Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan;
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan inovasi daerah;
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.
2. Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang pro investasi;

- b. Menerapkan inovasi dan teknologi pertanian dan perikanan;
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan perikanan;
 - d. Mengembangkan atraksi dan even wisata;
 - e. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik;
 - f. Peningkatan jumlah kewirausahaan pemuda;
 - g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UKM;
 - h. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor primer;
 - i. Peningkatan kualitas ekonomi kreatif;
 - j. Pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah, dengan fokus pada:
- a. Melaksanakan pembangunan jalan tuntas ruas;
 - b. Meningkatkan pengelolaan dan tata guna air irigasi;
 - c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih;
 - d. Pengembangan manajemen persampahan;
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung jalan.
4. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:
- a. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru;
 - b. Meningkatkan cakupan penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Penanganan RTLH secara terpadu;
 - d. Peningkatan keterampilan berusaha dan fasilitasi informasi lapangan pekerjaan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik; Penyederhanaan prosedur untuk mengakses layanan publik;
- b. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika politik;
- c. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar dan intra umat beragama;
- d. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
- e. Pengurangan risiko bencana melalui mitigasi dan pencegahan kejadian bencana.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5.01 URUSAN PERENCANAAN										
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	Baperlitbang	100%	7.642.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	Baperlitbang	100%	5.470.256.000
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Baperlitbang	100%	22.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Baperlitbang	100%	22.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Baperlitbang	7 Dokumen	10.000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Baperlitbang	7 Dokumen	10.000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Baperlitbang	3 dokumen	12.,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Baperlitbang	3 dokumen	12.,500,000
5.01.01.2.02	Kegiatan Adminastrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Baperlitbang	100%	4.880.000.000	Kegiatan Adminastrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Baperlitbang	100%	4.410.454.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Baperlitbang	32 orang	4.800.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Baperlitbang	32 orang	4.306.054.000

		Tunjangan ASN								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Baperlitbang	12 Dokumen	80.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Baperlitbang	12 Dokumen	104.400.000
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Baperlitbang	100%	100.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Baperlitbang	100%	140.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Baperlitbang	60 orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Baperlitbang	60 orang	140.000.000
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baperlitbang	100%	625.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baperlitbang	100%	636.299.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Baperlitbang	2 paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Baperlitbang	2 paket	25.001.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Baperlitbang	2 paket	600.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Baperlitbang	2 paket	611.298.000
5.01.01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Baperlitbang	100%	50.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Baperlitbang	100%	133.699.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Baperlitbang	1 podium; Perlengkapan ruang rapat	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Baperlitbang	1 podium; Perlengkapan ruang rapat, AC	133.699.000
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Baperlitbang	100%	520.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang	Baperlitbang	100%	523.157.000

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Baperlitbang	12 Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Baperlitbang	12 Laporan	119.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Baperlitbang	12 Laporan	400.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Baperlitbang	12 Laporan	403.957.000
5. 01. 01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Baperlitbang	100%	270.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Baperlitbang	100%	215.445.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Baperlitbang	4 Mobil 16 Motor	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Baperlitbang	4 Mobil 16 Motor	119.640.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Baperlitbang	1 unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Baperlitbang	1 unit	40.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Baperlitbang	50 unit (CCTV, AC, printer, computer)	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Baperlitbang	50 unit (CCTV, AC, printer, computer)	55.805.000

5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD/ RPJMD/ RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Baperlitbang	2 Dokumen	650.000.000	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD/ RPJMD/ RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Baperlitbang	2 Dokumen	750.000.000
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Baperlitbang	2 Dokumen	350.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Baperlitbang	2 Dokumen	250.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten atau Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD/RPJMD/RKPD	Baperlitbang	2 Dokumen	350.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten atau Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD/RPJMD/RKPD	Baperlitbang	2 Dokumen	250.000.000
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen indikator ekonomi makro daerah	Baperlitbang	100%	300.000.000	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen indikator ekonomi makro daerah	Baperlitbang	100%	500.000.000
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Baperlitbang	1 Dokumen	250.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Baperlitbang	1 Dokumen	350.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Baperlitbang	1 Berita Acara	50.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Baperlitbang	1 Berita Acara	150.000.000
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPD kedalam RKPD	Baperlitbang	100%	1.370.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPD kedalam RKPD	Baperlitbang	100%	1.415.000.000
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen	Baperlitbang	100%	555.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen	Baperlitbang	100%	590.000.000

		perencanaan					perencanaan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD,RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	350.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD,RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	350.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Baperlitbang	PD	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Baperlitbang	PD	20.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD,RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	165.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD,RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	0
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Baperlitbang	1 Laporan	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Baperlitbang	1 Laporan	200.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Baperlitbang	PD	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Baperlitbang	PD	20.000.000
5. 01. 03. 2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (	Prosentase Perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Baperlitbang	100%	500.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (	Prosentase Perangkat daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dikoordinir dalam	Baperlitbang	100%	340.000.000

	Sumber Daya Alam)	yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan				Sumber Daya Alam)	Penyusunan dokumen perencanaan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	145.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Baperlitbang	4 PD	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Baperlitbang	4 PD	50.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Baperlitbang	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Baperlitbang	1 Laporan	25.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD,RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD,RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	25.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Baperlitbang	4 PD	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Baperlitbang	4 PD	25.000.000

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Baperlitbang	1 laporan	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Baperlitbang	1 laporan	70.000.000
5. 01. 03. 2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan	Baperlitbang	100%	315.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan	Baperlitbang	100%	485.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	25.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Baperlitbang	PD	25.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Baperlitbang	PD	25.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Baperlitbang	PD	140.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Baperlitbang	PD	155.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	Baperlitbang	1 Dok	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Baperlitbang	1 Dok	110.000.000

	Infrastruktur	pada Bidang Infrastruktur				Infrastruktur	Bidang Infrastruktur			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dok	25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dok	30.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Baperlitbang	PD	25.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Baperlitbang	PD	25.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Baperlitbang	PD	25.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Baperlitbang	PD	30.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 Dokumen	85.000.000
5.05 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5. 05. 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	Baperlitbang	30%	2.090.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Baperlitbang	30%	2.359.446.000
5. 05. 02. 2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Baperlitbang		150.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Baperlitbang		100.000.000

	Pengkajian Peraturan	Pemerintah dan Pengkajian Peraturan				Pengkajian Peraturan	dan Pengkajian Peraturan			
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Baperlitbang	1 Laporan	150.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Baperlitbang	1 Laporan	100.000.000
5. 05. 02. 2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Baperlitbang	2 Dokumen	250.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Baperlitbang	2 Dokumen	450.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Baperlitbang	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Baperlitbang	1 Dokumen	300.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Baperlitbang	1 Dokumen	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Baperlitbang	1 Dokumen	150.000.000
5. 05. 02. 2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Baperlitbang		1.490.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Baperlitbang	1 Dokumen	1.230.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan			290.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan	Baperlitbang	1 Dokumen	450.000.000

		Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Baperlitbang	1 Dokumen			Perdagangan			
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Baperlitbang	1 Dokumen	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Baperlitbang	1 Dokumen	100.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Baperlitbang	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Baperlitbang	1 Dokumen	100.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Baperlitbang	1 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Baperlitbang	1 Dokumen	85.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Baperlitbang	1 Dokumen	300.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Baperlitbang	1 Dokumen	85.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baperlitbang	2 Dokumen	300.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baperlitbang	2 Dokumen	170.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Baperlitbang	2 Dokumen	250.000.000	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Baperlitbang	2 Dokumen	240.000.000
5. 05. 02. 2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1	200.000.000	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1	579.446.000

			Baperlitbang	Dokumen				Baperlitbang	Dokumen	
	Penelitian , Pengembangan dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Baperlitbang	1 Dokumen	200.000.000	Penelitian , Pengembangan dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Baperlitbang	1 Dokumen	579.446.000

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Belum optimalnya dukungan anggaran dalam program penelitian dan pengembangan daerah sebagai salah satu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baperlitbang.
2. Belum optimalnya dukungan anggaran untuk mendukung tugas Baperlitbang dalam koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	N I H I L				

3. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BAPERLITBANG

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan RPJPN Tahun 2005 – 2025, arah kebijakan umum pembangunan nasional pada periode jangka menengah ke-4 (Tahun 2020 – 2024) adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu

didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi

luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan

jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Baperlitbang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010). Merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, maka ditetapkan tujuan jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik;
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah:
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah

Tujuan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah
:
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

Tujuan 3. Meningkatnya Efektivitas dan Trasnparansi Layanan Publik

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah
:
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik BAPERTLITBANG

2.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 kami sajikan sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

No	Kode	Kategori Kegiatan Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Utama	Indikator Keberhasilan Kegiatan Utama	Tingkat Akses Kejelasan Penerapan Kegiatan	Pengaruh Kegiatan Keterkaitan Kegiatan	Pengaruh Kegiatan Keterkaitan Kegiatan	DASAR KEMERDEKAAN BERKUALITAS PENERAPAN						Indikator Kejelasan Penerapan	Pengaruh Hasil Kegiatan Mendukung		Indikator Keberhasilan Kegiatan Utama
							Tingkat Akses	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Indikator Kejelasan Penerapan	Indikator Kejelasan Penerapan	Indikator Kejelasan Penerapan	Indikator Kejelasan Penerapan		Indikator Kejelasan Penerapan	Indikator Kejelasan Penerapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SALAH PENERAPAN PERILAKU DAN PERUBAHAN						10.000.000.000,00							10.000.000.000,00	
5		UNSUR PEMUNGKIL URUSAN PEMERINTAHAN						10.000.000.000,00							10.000.000.000,00	
5.01		PERENCANAAN						7.000.000.000,00							7.000.000.000,00	
5.01.01	5.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01	5.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01	5.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
5.01	5.01															

[illegible]

No	KODE	Kategori Kegiatan Masyarakat / Organisasi / Lembaga Kerjasama	Kategori Kegiatan Kerjasama / Mitra Kerjasama	Tipe Kegiatan Kerjasama	Kategori Kegiatan Kerjasama	Kategori Kegiatan Kerjasama	GAMBAR KEMERIN DAN KEMERIN PENGANTAR						Kategori Kegiatan	PENGANTAR KEMERIN KEMERIN		PENGANTAR KEMERIN KEMERIN		
							Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan		Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan													Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan																
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan				2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan			2. Kegiatan	Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan		
			Kategori Kegiatan / Kegiatan / Kegiatan															

No	Kategori	Uraian Kegiatan Kegiatan yang akan dilaksanakan	Pencapaian yang diharapkan	Indikator Keberhasilan	Mekanisme Pelaksanaan	Sumber Daya	DASAR HUKUM DAN KERANGKA PENDANAAN						Kategori Kegiatan	Pembahasan Kegiatan		Pembahasan Kegiatan
							Tujuan	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator		Tujuan	Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Ketersediaan, Peningkatan, dan Peningkatan dan Peningkatan				1. Dokumen	2. Dokumen	3. Dokumen	4. Dokumen	5. Dokumen	6. Dokumen	7. Dokumen	8. Dokumen	9. Dokumen	10. Dokumen
			JUMLAH													

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan/sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - 2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:
 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 4) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- b. Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA, meliputi sub kegiatan :
- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi sub kegiatan :
- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

- 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, meliputi kegiatan :
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, meliputi sub kegiatan :
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - 4) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - 5) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 - 6) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 7) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
 - d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Baperlitbang Tahun 2023-2026. Renja Baperlitbang selanjutnya menjadi platform operasional bagi Baperlitbang dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Baperlitbang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Baperlitbang setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Baperlitbang masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Baperlitbang menjadi acuan bagi Kepala Baperlitbang dan seluruh bidang serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Juli 2023

KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199703 1 003



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANJARNEGARA

WWW.BPPKAD.BANJARNEGARAKAB.GO.ID

RENCANA KERJA TAHUN 2024 BPPKAD KAB. BANJARNEGARA

2024

BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



Jalan Ahmad Yani No. 3
Banjarnegara, 53418
(0286) 591081

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

BAB I PENDAHULUAN.....1

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU8

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....84

BAB V PENUTUP.....89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
 28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
 29. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;

- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pertanahan dan Urusan Keuangan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 5 program, 15 kegiatan, dan 51 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 439.903.948.000,00 dengan fokus utama pada pemantapan system dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Jumlah bidang tanah yang dimiliki Pemkab Banjarnegara setiap tahun cenderung berubah dan bertambah sehingga belum seluruhnya tanah Pemkab bersertifikat.
2. Persentase Rasio Kemandirian daerah yang relative masih rendah sehingga ditempuh kebijakan menggali potensi pendapatan daerah yang ada pada tahun 2022.

Dari 5 program, 15 kegiatan, dan 51 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 5 program, 15 kegiatan, dan 51 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.438.423.382.150,00. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub

kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 15 kegiatan, dan 51 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 477.276.609.688,00 Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah/berkurang meliputi 4 program 15 kegiatan dan 36 sub kegiatan.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Daerah. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Penyelesaian kasus kerugian daerah yang ditargetkan selesai 4 kasus pada tahun 2022 dapat menyelesaikan 3 kasus karena proses penyelesaian kasus memakan waktu cukup lama melalui beberapa tahapan dan pembahasan yang tidak cukup 1 kali dilaksanakan.
 2. Perluasan pelaksanaan sosialisasi pajak daerah yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan waktu dan anggaran sehingga dijadwalkan kembali di tahun berikutnya.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program

Penatagunaan Tanah dengan kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Semakin meningkatnya kapasitas sumber daya manusia;
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran serta perencanaan pelaksanaan kegiatan terhadap pengelolaan penatausahaan keuangan daerah serta pengelolaan pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Sosialisasi terhadap wajib pajak daerah serta menggali potensi yang ada;
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah
3. Pembinaan terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		2021-2022	2023								
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah dalam satu kabupaten	Persentase Luas Tanah Pmkab yang bersertifikat	50.72%	100%	100%	100%	100%	43.14%	43.14%	85,05%
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah pmkab yang disusun	Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah pmkab yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran,	Jumlah Dokumen Perencanaan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan	12 Dokumen	100%	100%	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kinerja OPD yang disusun tepat waktu								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	66 Orang	66 Orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengajuan yg telah diterbitkan SPM dan SP2D nya	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	100%	150 Dokumen	150 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan dan semesteran OPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaan keuangan	Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SDM pengelola keuangan yang mengikuti bimtek/pelatihan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang- undangan	20 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	100%	25 Orang	25 Orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Paket	12 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Paket	12 Paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan jumlah BMD	Persentase penambahan jumlah BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penambahan kendaraan dinas	Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	20 Unit	22 Unit	22 Unit	19 Unit	86,37%	15 Unit	291 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		operasional atau lapangan									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penambahan peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	106 Unit	36 Unit	36 Unit	39 Unit	108,33%	106 Unit	45 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa pengiriman surat untuk 1 tahun	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terbayarnya tagihan telpon/internet, Air dan listrik untuk 1 tahun	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor/ honor PTT dan THL untuk 1 tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang terfasilitasi	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya jasa pemeliharaan kendaraan dan STNK	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	50 Unit	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	50 Unit	50 Unit	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor BPPKAD, peralatan gedung kantor untuk 1 tahun	Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	30 Unit	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	30 Unit	30 Unit	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase serapan dana transfer daerah	Persentase serapan dana transfer daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	Persentase Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyusunan Panganggaran yang tepat waktu	Persentase Penyusunan Panganggaran yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD	Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD	>90%	>90	>90	>90	100%	>90	>90	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan waktu dan mutu penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan waktu dan mutu penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD	Berita Acara Hasil Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	44 Berita Acara	44 Berita Acara	44 Berita Acara	100%	44 Dokumen	44 Dokumen	100%
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Berita Acara Hasil Verifikasi RKA Perubahan SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	44 Berita Acara	44 Berita Acara	44 Berita Acara	100%	44 Dokumen	44 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Ketepatan waktu dan mutu Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Ketepatan waktu dan mutu Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina Jumlah OPD yang penganggarnya tepat	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	44 OPD 44 OPD	44 OPD 44 OPD	44 OPD 44 OPD	100%	44 Orang	44 Orang	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloan dana transfer	Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloan dana transfer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen Kasda yang disusun (Buku Harian)	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Angggaran kas yang dikendalikan Jumlah SPD yang diterbitkan	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD	44 Dokumen	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	100%	44 Dokumen	44 Dokumen	100%
	Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	Jumlah serapan dana transfer daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	7 Dokumen	Rp335 Miliar	Rp335 Miliar	Rp335 Miliar	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Dana Transfer Lainnya		Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Berita Acara Rekonsiliasi DBH Pajak Provinsi, BPJS Kesehatan, PT Taspen, Pajak Pusat Berita Acara Rekonsiliasi Kas Daerah	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	27 Laporan	12 Berita Acara 12 Berita Acara	12 Berita Acara 12 Berita Acara	12 Berita Acara 12 Berita Acara	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang dibina Jumlah OPD yang penatausahaan keuangannya tepat	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	44 OPD 44 OPD	44 OPD 44 OPD	44 OPD 44 OPD	100%	44 Orang	44 Orang	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus	Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kerugian daerah yang diselesaikan									
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Ketepatan waktu dan mutu konsolidasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	44 Laporan	44 SKPD 44 Kertas Kerja	44 SKPD 44 Kertas Kerja	44 SKPD 44 Kertas Kerja	100%	44 Laporan	44 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan	Ketepatan waktu dan mutu penyusunan rancangan Perda tentang Penjabaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota		Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah kasus tuntutan ganti rugi yang terselesaikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 Dokumen	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Laporan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Sistem Informasi Keuangan yang dipelihara dan dikembangkan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	100%	44 Orang	44 Orang	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Standard Harga	Ketepatan waktu dan mutu penyusunan SSH	Jumlah SSH yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah Pemkab yang bersertifikat	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	600 Bidang	600 Bidang	327 Bidang	54,5%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Tanah Pemkab yang Dilelang	Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen 178 Bidang	1 Dokumen 178 Bidang	1 Dokumen 178 Bidang	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	5%	14.12%	5%	27.12%	100%	5%	5%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5%	14.12%	5%	27.12%	100%	5%	5%	100%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan Analisis	Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Identifikasi sarana dan prasarana pengelola pajak Rencana	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	738 Unit/ Box	11 Jenis Pajak Daerah	11 Jenis Pajak	11 Jenis Pajak Daerah	100%	130 Unit	130 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengelolaan Pajak Daerah	kebutuhan sarana dan prasarana pengelola pajak			1 Dokumen	Daerah 1 Dokumen	1 Dokumen				
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data objek dan subjek pajak PBB dan BPHTB	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	14000 OP/SP	14000 OP/SP	14000 OP/SP	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Dokumen ,	1 Dokumen ,	1 Dokumen ,	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT yang diterbitkan	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	14.000 OP	730000 Lembar	730000 Lembar	745442 Lembar	102,11%	14.000 OP	14.000 OP	100%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan	Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah	1 Dokumen	2515 WP	2515 WP	2650 WP	105,37%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah WP yang berkonsultasi Jumlah WP yang terlayani	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	750 Layanan	500 WP 500 WP	500 WP 500 WP	650 WP 650 WP	130%	750 WP	750 Layanan	100%
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang pajak daerah yang belum tertagih	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 Dokumen	Rp21.370.	Rp21.370.	Rp171.139.000	265.77%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah piutang pajak daerah yang tertagih			712 Rp43.022.048	712 Rp43.022.048					
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak PBB dan BPHTB	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dokumen	Rp30.804.952.532	Rp35.750.000.000	Rp38.598.000.000	107,97%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah OPD pengelola retribusi yang dibina	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	8 OPD	8 OPD	8 OPD	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 8 Indikator. Dari 8 indikator tersebut, semuanya berstatus tercapai Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Monitoring dan Evaluasi serta penagihan pajak;
2. Penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu;
3. Pembinaan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Dalam hal kurangnya kesadaran wajib pajak atas kewajibannya sehingga perlu dilakukan penagihan serta monitoring dan evaluasi;
2. Bagi OPD yang penyusunan Laporan Keuangannya belum tepat waktu dilakukan pendampingan agar tersusun tepat waktu;
3. OPD yang belum tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dilakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN PERTANAHAN												
1	Persentase Tanah Yang Bersertifikat		IKK	43.14%	50.72%	58.30%	65.88%	35,56%	70,14%	43.14%	50.72%	
2	Prosentase kepastian hukum, pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		IKK					76,05%	107,91%			
URUSAN KEUANGAN												
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah / Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)		LPPD					15,04%	13,94%			
2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		IKK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Persentase pertumbuhan PAD		IKK	5%	5%	5%	5%	31,48%	-9,32%	5%	5%	
4	Persentase pertumbuhan Pajak dan Retribusi		IKK	5%	5%	5%	5%	14,12%	27,12%	5%	5%	
5	Penetapan APBD tepat waktu		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Kegiatan dalam KUA PPAS yang terakomodir dalam APBD		IKK	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	
7	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
	dengan SAP yang terselesaikan tepat waktu											
9	Tingkat penyerapan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi		IKK	100%	100%	100%	100%	105,90%	117,36%	100%	100%	
10	Jumlah Pendapatan BUMD yang disetor ke Kas Daerah		IKK					17,259. miliar	18,112 miliar			
11	Persentase satker yang telah mengimplementasikan SIMDA BMD		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan		LPPD					26.13%	28.14%			
13	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		LPPD					65.81%	62.83%			
14	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		LPPD					4.94%	6.95%			
15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		LPPD					9.14%	1.63%			
16	Persentase SILPA		LPPD					4,15%	3,65%			

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan Pertanahan dan Urusan Keuangan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah terutama asset tanah yang bersertifikat.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat;
2. Belum ada kepastian hukum terhadap tanah Pemkab yang belum bersertifikat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Tantangan dalam meningkatkan rasio kemandirian daerah yaitu target peningkatan pendapatan daerah dalam upaya mendorong pada perwujudan kemandirian daerah memberikna motivasi besar bagi BPPKAD untuk membangun strategi yang efektif dalam meningkatkan potensi-potensi daerah. Sedangkan peluang dalam meningkatkan rasio kemandirian daerah adalah besarnya potensi-potensi

pendapatan daerah yang belum terolah secara optimal memberikan peluang bagi BPPKAD untuk lebih kreatif dalam melakukan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah terutama asset tanah yang bersertifikat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 yaitu Pemantapan system dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi BPPKAD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat	50.72%	869.127.000,00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat	50.72%	869.127.000,00	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota		Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah Pemkab yang disusun	100%	869.127.000,00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota		Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah Pemkab yang disusun	100%	869.127.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota	1 Laporan	869.127.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota	1 Laporan	869.127.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	49.164.399.783,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	49.164.399.783,00	
	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	35.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	35.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	19.999.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	15.000.100,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	12.399.942.607,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100%	12.117.406.733,00	
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	11.992.942.607,00	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	11.710.406.733	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	400.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	400.000.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/		Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran	4 Dokumen	7.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/		Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran	4 Dokumen	7.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Verifikasi Keuangan SKPD		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Verifikasi Keuangan SKPD		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaan keuangan	100%	75.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaan keuangan	100%	75.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	75.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	75.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	819.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	819.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	44.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	44.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	775.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	775.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penambahan jumlah BMD	100%	11.338.340.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penambahan jumlah BMD	100%	11.338.340.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	20 Unit	10.479.700.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	20 Unit	10.479.700.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	106 Unit	858.640.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	106 Unit	858.640.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	18.880.607.176,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100%	18.880.607.467,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	999.500,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	18.184.607.176,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	18.185.350.967,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	695.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	694.257.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang terfasilitasi	100%	471.550.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang terfasilitasi	100%	471.550.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	50 Unit	160.100.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	50 Unit	160.100.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	30 Unit	311.450.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	30 Unit	311.450.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	433.228.818.300,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	433.228.818.300,00	
			Persentase serapan dana transfer daerah	100%				Persentase serapan dana transfer daerah	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Persentase Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	100%				Persentase Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	100%		
			Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	100%				Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	100%		
			Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD	>90%				Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD	>90%		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	100%	993.095.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	100%	993.095.600,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	28.213.600,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	28.213.600,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	25.830.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	25.830.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	5.800.000,00	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	5.800.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	5.800.000,00	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen	5.800.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	688.692.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	688.692.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	2 Dokumen	76.847.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	2 Dokumen	76.847.500,00	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	161.912.000 ,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	161.912.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengelolaan dana transfer	100%	562.253.900,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengelolaan dana transfer	100%	562.253.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	39.403.800,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	55.732.600,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD	44 Dokumen	59.839.700,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD	44 Dokumen	59.879.300,00	
	Koordinasi Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 Dokumen	33.370.000,00	Koordinasi Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 Dokumen	33.370.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam	27 Laporan	166.702.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam	27 Laporan	150.334.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota	44 Orang	262.938.000,00	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota	44 Orang	262.938.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan	100%	470.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan	100%	470.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan		Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan	12 Laporan	45.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan		Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan	12 Laporan	45.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengeluaran Kas Daerah		Pengeluaran Kas Daerah			Pengeluaran Kas Daerah		Pengeluaran Kas Daerah			
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	4 Laporan	30.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	4 Laporan	30.000.000,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	44 Laporan	160.000.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	44 Laporan	160.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota		Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	220.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota		Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	220.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan	1 Dokumen	15.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah			Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	100%	431.168.390.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	100%	431.168.390.000,00	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 laporan		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	360.000.000,00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 Laporan	414.970.699.000,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 Laporan	414.970.699.000,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 Laporan	3.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 Laporan	3.000.000.000,00	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	13.197.691.000,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1 Laporan	12.837.691.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	100%	35.078.800,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	100%	35.078.800,00	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	35.078.800,00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	35.078.800,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100%	1.348.516.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100%	1.348.516.500,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun	100%	1.348.516.500,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun	100%	1.348.516.500,00	
	Penyusunan Standard Harga		Jumlah SSH yang disusun	1 Dokumen	80.000.000 00	Penyusunan Standard Harga		Jumlah SSH yang disusun	1 Dokumen	80.000.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	463.050.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	463.050.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian		Jumlah Laporan Pengawasan dan	1 Laporan	148.350.000,00	Pengawasan dan Pengendalian		Jumlah Laporan Pengawasan dan	1 Laporan	148.350.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Pengendalian pengelolaan BMD			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Pengendalian pengelolaan BMD			
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	1 Dokumen	657.116.500,00	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah	1 Dokumen	657.116.500,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	5%	3.156.634.291,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	5%	3.156.634.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan		Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5%	3.156.634.291,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan		Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5%	3.156.634.000,00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.	1 Dokumen	187.196.800,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.	1 Dokumen	187.196.800,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan	217.478.400,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan	207.478.300,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	738 Unit/ Box	156.004.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	738 Unit/ Box	156.004.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	214.653.300,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	214.653.300,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	402.095.400,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	402.095.400,00	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	730.000 OP	70.167.200,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	730.000 OP	70.167.200,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah	1 Dokumen	803.045.500,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah	1 Dokumen	813.045.500,00	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	750 Layanan	138.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	750 Layanan	138.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 Dokumen	617.952.591,00	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 Dokumen	617.952.400,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dokumen	146.759.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dokumen	146.759.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	153.123.900,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	153.123.900,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	50.158.200,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	50.158.200,00	
	JUMLAH				482.622.535.874,00					482.340.000.000,00	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, belum terdapat hal yang menjadi catatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah <i>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	Banjar negara	Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	43 usulan	

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah <i>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	Banjar negara	Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	433 usulan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamantkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan nasional.

Telaah terhadap RPJMN Tahun 2020 – 2025, arah kebijakan umum pembangunan nasional pada periode jangka menengah ke-4 (Tahun 2020 – 2024) adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap

keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

BPPKAD Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan Anggaran daerah secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dibarengi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyusunan rencana kerja. Visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 adalah :

“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”

Prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 yang didukung oleh BPPKAD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, penanganan pertanahan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara. Prioritas pembangunan tersebut mendukung pencapaian misi ketiga RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab yang ditandai dengan meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem dan iklim demokrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 berupa pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah maka tujuan Renja BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator tujuan yaitu Indek Pengelolaan Keuangan daerah. Untuk tujuan tersebut, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja pengelolaan pendapatan, keuangan dan penatausahaan aset daerah secara tertib, akuntabel dan transparan;
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendorong kemandirian daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Anggaran BPPKAD Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										869.127.000	912.583.350	
2.10.1 0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Meningkatn ya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Persentas e Luas Tanah Pembab yang bersertifi kat			50.72 %			869.127.000	912.583.350	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
2.10.1 0.1-01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n			Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah pemkab yang disusun			100%	869.127.000	912.583.350	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2.10.1 0.1- 01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota			1 Laporan		869.127.000	912.583.350	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.2	KEUANGAN										481.470.873.000	505.841.079.318	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%			43.736.903.909	46.220.411.772	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 1.2-01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu			12 Doku men	35.000.000	36.750.000	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2- 01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Doku men		20.000.000	21.000.000	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2- 01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan			6 Doku men		15.000.000	15.750.000	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Berkeadil an
5.02.0 1.2-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatn ya kinerja penyelengg araan pemerintah an daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an			Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia			100%	12.117.406.73 3	13.019.939.73 7	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2- 02.001	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah an daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			66 Orang		11.710.406.73 3	12.592.589.73 7	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 1.2- 02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintaha n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah dokumen penatausahaa n dan pengujian/veri fikasi Keuangan SKPD			150 Doku men		400.000.000	420.000.000	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2- 02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintaha n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			4 Doku men		7.000.000	7.350.000	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 1.2-05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatn ya kinerja penyelengg araan pemerintah an daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an			Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaa n keuangan			100%	75.000.000	78.750.000	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2- 05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah an daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang- undangan			20 Orang		75.000.000	78.750.000	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatn ya kinerja penyelengg araan pemerintah an daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an			Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran			100%	819.000.000,0 0	859.950.000,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 1.2- 06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1 Paket		44.000.000,00	46.200.000,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2- 06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan			1 Paket		775.000.000,0 0	813.750.000,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Priori- tas Daera- h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang- an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr- am	Keluar- an Sub Kegiat- an	Hasil Kegiat- an			
5.02.0 1.2-07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatny- a kinerja penyelengga- raan pemerintah- an daerah	Semua Kabupat- en/ Kota, Semua Kecamat- an, Semua Keluraha- n			Persentase penambahan jumlah BMD			100%	11.338.340.00 0	11.905.257.00 0	Memperk- uat Ketahana- n Ekonomi Untuk Pertumbu- han Yang Berkualit- as dan Berkeadil- an
5.02.0 1.2- 07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Meningkatny- a kinerja penyelengga- raan pemerintah- an daerah	Semua Kabupat- en/ Kota, Semua Kecamat- an, Semua Keluraha- n		Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan			20 Unit		10.479.700.00 0	11.003.685.00 0	Memperk- uat Ketahana- n Ekonomi Untuk Pertumbu- han Yang Berkualit- as dan Berkeadil- an
5.02.0 1.2- 07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatny- a kinerja penyelengga- raan pemerintah- an daerah	Semua Kabupat- en/ Kota, Semua Kecamat- an, Semua Keluraha- n		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			106 Unit		858.640.000,0 0	901.572.000,0 0	Memperk- uat Ketahana- n Ekonomi Untuk Pertumbu- han Yang Berkualit- as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 1.2-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintaha n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n			Persentase jasa pelayanan umum kantor, surat menyurat, jasa komunikasi,s umber daya air dan listrik yang terpenuhi			100%	18.880.607.17 6,00	19.824.637.53 5,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2- 08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintaha n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 Lapora n		1.000.000,00	1.050.000,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 1.2- 08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			1 Lapora n		18.184.607.17 6,00	19.093.837.53 5,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2- 08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan			1 Lapora n		695.000.000,0 0	729.750.000,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatn ya kinerja penyelengg araan pemerintah an daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an			Persentase pemeliharaan sarana dan prasaran kantor yang terfasilitasi			100%	471.550.000,0 0	495.127.500,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 1.2- 09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya			50 Unit		160.100.000,0 0	168.105.000,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 1.2- 09.010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatny a kinerja penyelengga raan pemerintah n daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara			30 Unit		311.450.000,0 0	327.022.500,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Meningkatn ya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Persentas e Penerbita n SP2D yang tepat waktu			100%			433.228.818.3 00,00	454.890.259.2 15,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
					Persentas e serapan dana transfer daerah			100%					Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
					Persentas e Penyusun an laporan Pertanggu ng jawaban Pelaksana an APBD yang			100%					Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
					tepat waktu								Berkeadil an
					Persentas e Penyusun an Pengangg aran yang tepat waktu			100%					Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
					Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD			>90%					Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 2.2-01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Meningkatn ya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an			Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun			100%	993.095.600,0 0	1.042.750.380 ,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 01.001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun			2 Doku men		28.213.600,00	29.624.280,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 01.002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun			2 Doku men		25.830.000,00	27.121.500,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 2.2- 01.003	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi			44 Doku men		5.800.000,00	6.090.000,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 01.004	Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi			44 Doku men		5.800.000,00	6.090.000,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 2.2- 01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 Doku men		688.692.500,0 0	723.127.125,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD			2 Doku men		76.847.500,00	80.689.875,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 01.013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Ko ta			44 Orang		161.912.000	170.007.600	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 2.2-02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n			Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer			100%	562.253.900	590.366.595	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 02.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			12 Doku men		39.403.800,00	41.373.990,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 2.2- 02.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD			44 Doku men		59.839.700,00	62.831.685,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 02.005	Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			7 Doku men		33.370.000,00	35.038.500,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 2.2- 02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			27 Lapora n		166.702.400,0 0	175.037.520,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 2.2- 02.011	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaa n Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota			44 Orang		262.938.000,00	276.084.900,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2-03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan			100%	470.000.000,00	493.500.000,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 03.001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			12 Lapora n		45.000.000,00	47.250.000,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 2.2- 03.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan Pertanggungja waban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran			4 Lapora n		30.000.000,00	31.500.000 ,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 03.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi			44 Lapora n		160.000.000,0 0	168.000.000,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 2.2- 03.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Ko ta dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Ko ta			1 Doku men		220.000.000,0 0	231.000.000,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 03.007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan kerugian daerah			1 Doku men		15.000.000,00	15.750.000,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 2.2-04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n			Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan			100%	431.168.390.0 00	452.726.809.5 00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 04.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan			1 Lapora n		414.970.699.0 00	435.719.233.9 50	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2- 04.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak			1 Lapora n		3.000.000.000, 00	3.150.000.000, 00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 2.2- 04.010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota			1 Lapora n		13.197.691.00 0,00	13.857.575.55 0,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 2.2-05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n			Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara			100%	35.078.800,00	36.832.740,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 2.2- 05.001	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Ko ta			44 Orang		35.078.800,00	36.832.740,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 3.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Meningkatn ya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Persentas e Penyusun an Laporan BMD yang tepat waktu			100%			1.348.516.500 ,00	1.415.942.325 ,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 3.2-01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Meningkatn ya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an			Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun			100%	1.348.516.500 ,00	1.415.942.325 ,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 3.2- 01.001	Penyusunan Standard Harga		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah SSH yang disusun			1 Doku men		80.000.000,00	84.000.000,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 3.2- 01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah			1 Lapora n		463.050.000,0 0	486.202.500,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 3.2- 01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD			1 Lapora n		148.350.000,0 0	155.767.500,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 3.2- 01.011	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah			1 Doku men		657.116.500,0 0	689.972.325,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Meningkatn ya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Persentas e Pertumbu han Pajak daerah dan Retribusi Daerah	5%					3.156.634.291 ,00	3.314.466.006 ,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 4.2-01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n			Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			5%	3.156.634.291 ,00	3.314.466.006 ,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 4.2- 01.002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.			1 Doku men		187.196.800,0 0	196.556.640,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 4.2- 01.003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Pajak daerah			4 Lapora n		217.478.400,0 0	228.352.320,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 4.2- 01.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah			738 Unit/ Box		156.004.000,0 0	163.804.200,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 4.2- 01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			1 Lapora n		214.653.300,0 0	225.385.965,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 4.2- 01.006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			1 Lapora n		402.095.400,0 0	422.200.170,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 4.2- 01.007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya			730.00 0 OP		70.167.200,00	73.675.560,00	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
5.02.0 4.2- 01.008	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah			1 Doku men		803.045.500,0 0	843.197.775,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 4.2- 01.009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah			750 Layan an		138.000.000,0 0	144.900.000,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 4.2- 01.011	Penagihan Pajak Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah			5 Doku men		617.952.591,0 0	648.850.221,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Priori tas Daera h	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterang an
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			
													Berkeadil an
5.02.0 4.2- 01.013	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah			2 Doku men		146.759.000,0 0	154.096.950,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an
5.02.0 4.2- 01.014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupat en/ Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			1 Lapora n		153.123.900,0 0	160.780.095,0 0	Memperk uat Ketahana n Ekonomi Untuk Pertumbu han Yang Berkualit as dan Berkeadil an

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) 2024	Prakiraan Maju (Rp.) 2025	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5.02.0 4.2- 01.015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			1 Laporan		50.158.200,00	52.666.110,00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
	J U M L A H										482.340.000.000,00	506.753.662.668,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPD Tahun 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pagu yang tersedia untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 482.340.000.000,00 digunakan untuk membiayai 5 program, 15 kegiatan, dan 53 sub kegiatan.

Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dapat di jabarkan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan :

 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;

- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - i. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - e. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

- Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
- b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
- c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota;
- 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
- a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

- **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Standar Harga;
- b. Inventarisasi Barang ;
- c. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

- **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dengan sub kegiatan yaitu:

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;

- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- i. Penagihan Pajak Daerah;
- j. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- k. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal: 2023

KEPALA BPPKAD
KABUPATEN BANJARNEGARA



DWI SURYANTO, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660518 198709 1 002



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANJARNEGARA

WWW.BPPKAD.BANJARNEGARAKAB.GO.ID

RENJA 2024

BPPKAD KAB. BANJARNEGARA

2024

BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



Jalan Ahmad Yani No. 3
Banjarnegara, 53418
(0286) 591081



RENJA

RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Rancangan Awal Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja tersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023-2026, dan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, 31 Juli 2023

Plh. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. ARIF SUHANDA

Pembina Tk. I

NIP. 19660905 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3 Program dan Kegiatan.....	49
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
 BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Banjarnegara	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara	25
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	29
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	36
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	37
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

- 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
 28. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 3 program, 12 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.868.789.448,-, dengan fokus utama pada meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Belum tersedianya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian yang lain.
2. Masih kurangnya jumlah aparatur dibanding dengan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja.
3. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Belum terlaksananya sistem pengembangan pola karir aparatur pemerintah daerah yang jelas dan terukur.
5. Belum adanya sistem yang jelas dan terukur yang dijadikan tolak ukur peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

Dari program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 6.616.000.000,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 12 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 10.482.495.384,-. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, sub kegiatan yang bertambah meliputi :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
9. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
10. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
11. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
12. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
13. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur
14. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang

baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi 6 sub kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terealisasi 80%. Karena belum membayar pajak kendaraan dinas roda empat yang jatuh tempo di bulan desember serta harga sparepart tidak sesuai harga pasar.
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, terealisasi 0%. Tidak dilaksanakannya karena tidak ada peserta tubel yang mengajukan bantuan stimulant.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, tercapai 51,20%. Terhambat belum turunnya izin Mendagri untuk melantik hasil seleksi terbuka JPT serta belum turunnya ijin mutasi (mutasi staf juga harus izin mendagri dan harus sudah mendapatkan pertek BKN).
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, tercapai 66,67%, karena Keterbatasan anggaran kontribusi dan biaya akomodasi peserta diklat.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi 22 sub kegiatan, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah 3 sub kegiatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menggali informasi atas kendala yang dihadapi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Pendampingan secara intens dengan para pengelola kepegawaian seluruh OPD sehingga dapat meminimalisasi permasalahan dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun).
3. Koordinasi yang baik antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan instansi terkait diantaranya dengan BKN, KASN, KemenPAN dan RB.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun perencanaan selanjutnya perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* dengan sistem kepegawaian lainnya.
2. Membangun sistem/kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional.
3. Mengintensifkan penerapan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Elektronik Kinerja Kebijakan pembayaran tunjangan kinerja dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja.
4. Menyusun dokumen *talent pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dari hasil assessment/uji kompetensi pegawai.
5. Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang pola karier.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP;	74,00	72,85	72,00	72,88	101,22	73,00 (BB)	73,00 (BB)	100%
		Nilai SKM	81,75	81,42	85,10	81,92	96,26	81,50	81,50	100%
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan kepegawaian yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01. 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	33 orang	33 orang	33 orang	100%	35 orang	35 orang	100%
5.03.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
		Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
5.03.01. 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%
5.03.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	100%	9 paket	9 paket	100%
5.03.01. 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	0	0 unit	0 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
5.03.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
5.03.01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	12 lapora n	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
5.03.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
5.03.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Reha bi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
5.03.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN KEPEGAWAIAN	Nilai Penerapan Sistem Merit	0,71	0,63 (B)	0,64 (B)	0,45 (K)	70,31	0,70 (B)	0,70 (B)	100%
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	48%	41,26%	55%	87,5%	159,09	45%	45%	100%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Presentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	85%	79,20%	80%	68,97%	86,21	82%	82%	100%
		Presentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	81%	72,95%	74%	94,84%	128,16	76%	76%	100%
		Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	76%	68,02%	70%	79,12%	113,02	72%	72%	100%
5.03.02. 2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi	91%	86,61%	0	0	100%	100%	100%	100%
5.03.02. 2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pengadaan ASN									
5.03.02. 2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.02. 2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.02. 2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)	1 lembaga	2 lembaga	2 lemba ga	2 lembaga	100%	2 lembaga	2 lembaga	100%
5.03.02. 2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
5.03.02. 2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan struktural yang terisi	91%	79,36%	91%	87,48%	96,13%	90%	90%	100%
5.03.02. 2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural	36%	34,24%	35%	36,30%	103,71	35%	35%	100%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	2 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	65%	54,10%	60%	65,56%	100,86 %	60%	60%	100%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 orang	8 orang	10 orang	0	0	5 orang	5 orang	100%
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 orang	-	-	-	-	3 orang	3 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 orang	123 orang	50 orang	176 orang	352,00	50 Orang	50 Orang	100%
		Jumlah ASN yg memperoleh pelayanan administrasi kesejahteraan ASN	1.200 orang	1.057 orang	1.200 orang	1.718 orang	143,17	1.200 orang	1.200 orang	100%
		Jumlah pejabat yang menyampaikan pelaporan LHKPN	99 orang	84 orang	99 orang	64	67,37	99 orang	99 orang	100%
5.03.02. 2.04.04	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2 orang	4 orang	2 orang	8	162,50	2 orang	2 orang	100%
		Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	15 dok	15 dok	15 dok	29 dok	193,33	15 dok	15 dok	100%
	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase Pengembangan SDM aparatur	50%	37,52%	40%	61,31%	153,27	40%	40%	100%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50%	37,52%	40%	61,13%	152,82	40%	40%	100%
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	60%	47,30%	50%	48,39%	96,78	50%	50%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10 jp	N/A	10 jp	18 jp	180%	10 jp	10 jp	100%
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55%	10,55%	50 %	10,77	21,54%	50%	50%	100%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 orang	63 orang	30 orang	0 orang	60,67%	30 orang	30 orang	100%
		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Ujian Kedinasan)	120 orang	100 orang	140 orang	136 orang	97,14%	100 orang	100 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55%	51,75%	50%	43,14%	80,96	50%	50%	100%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan	12 orang	35 orang	40 orang	40 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
		Jumlah CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi latsar	330 orang	376 orang	330 orang	329 orang	99,70%	500 orang	500 orang	100%
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 57 Indikator. Dari 57 indikator tersebut, 45 indikator berstatus tercapai dan 12 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 baru sampai hasil pengolahan Penilaian Kesesuaian oleh Dindikpora dan BKD Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022. Pengumuman final hasil seleksi akan diumumkan tanggal 2 s.d 3 Februari 2023.
2. Berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43723/R-KS.04.03/SD/K/2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Penyampaian hasil seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, peserta yang lulus seleksi berhak mengikuti pemberkasan pada tanggal 12 Januari s.d 5 Februari 2023.
3. Terhambatnya proses rotasi JPT berkaitan izin Mendagri pada sehingga pelantikan baru dapat dilaksanakan tahun 2023.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Mengajukan dokumen usulan kebutuhan pegawai dan formasi pegawai meliputi CPNS dan PPPK melalui portal e-formasi MenPAN dan RB.
2. Melakukan optimalisasi fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai di masa pandemi dengan tetap mengikutsertakan ASN dalam pelatihan secara streaming menggunakan media online zoom maupun tatap muka.
3. Melaksanakan uji kompetensi sebanyak 2 (dua) kali, pada tahap pertama Uji Kompetensi diselenggarakan bagi 146 Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan, sedangkan pada tahap kedua Uji Kompetensi diselenggarakan bagi 274 Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dan Pelaksana dengan kriteria golongan III/d dan III/c, pendidikan minimal D-

- III, serta usia di bawah 57 tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
4. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dua kali kegiatan:
 - a. Seleksi Terbuka Terhadap 2 Jabatan, yaitu Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, dan Kepala Disperindagkop UKM, dengan peserta sebanyak 12 orang.
 - b. Rotasi terhadap 2 jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
 - c. Seleksi Terbuka Terhadap 4 Jabatan, yaitu Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan & SDM, dan Asisten Administrasi & Umum, dengan peserta sebanyak 17 orang.
 - d. Evaluasi Jabatan Sekretaris Daerah.
 5. Mengajukan Draft Perbup tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
 6. Mengajukan Draft Perbup tentang Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Melalui Penelusuran Kader Potensial dan Rencana Suksesi.
 7. Mengajukan Draft Perbup tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
 8. Mengintensifkan penanganan penegakan disiplin pegawai dengan pemantauan dan monitoring sehingga beberapa kasus dapat terselesaikan di tingkat OPD.
 9. Tetap melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian yang melibatkan peserta yang cukup banyak dengan membagi jadwal kegiatan menjadi beberapa sesi; pada beberapa kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan perwakilan peserta dan selalu mentaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh dinas terkait, diantaranya dilaksanakan pada kegiatan pembagian SK Kenaikan Pangkat PNS, Pembagian SK pensiun, pembagian Piagam Penghargaan Satyalencana, dan Pelantikan Pejabat Struktural.

2. Menyelenggarakan fasilitasi/pelayanan administrasi kepegawaian diantaranya pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala; pemrosesan pemberian cuti pegawai; pemrosesan penerbitan karis/karsu, karpeg 348 orang dan kartu taspen; pemrosesan izin pengajuan perceraian; pemberian izin belajar; penggunaan gelar.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit			0,70	0,71	0,72	0,73	0,63	0,45	0,70	0,71	
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi			45%	48%	51%	54%	40,49%	87,5%	45%	48%	Telah melaksanakan <i>asesment</i> pegawai
3.	Persentase Pengembangan SDM aparatur			40%	50%	60%	70%	37,52%	61,13%	40%	50%	
4.	Nilai SAKIP			73,00 (BB)	74,00 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	72,85 (BB)	73,35 (BB)	73,00 (BB)	74,00 (BB)	
5.	Nilai SKM			81,50	81,75	82,00	82,25	81,42	81,92	81,50	81,75	
6.			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	65%	70%	75%	54,10%	65,56%	60%	65%	
7.			Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50%	55%	60%	65%	10,55%	10,77%	50%	55%	
8.			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50%	60%	70%	80%	30,07%	43,14%	50%	60%	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/202

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan kepegawaian serta urusan Pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

- 1) Masih kurangnya jumlah aparatur dibanding dengan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja.
- 2) Belum terlaksananya sistem pengembangan pola karir aparatur pemerintah daerah yang jelas dan terukur.
- 3) Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 4) Belum adanya sistem yang jelas dan terukur yang dijadikan tolak ukur peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.
- 5) Belum tersedianya sistem informasi kepegawaian secara lengkap dan terintegrasi.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

- 1) Capaian penilaian penerapan sistem merit yang rendah terutama dalam aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi pegawai, penghargaan dan perlindungan ASN.
- 2) Capaian penilaian PMPRB yang rendah terutama dalam area manajemen ASN.
- 3) Capaian penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang rendah terutama dalam aspek pengembangan SDM.
- 4) Capaian penilaian MCP KPK yang rendah terutama dalam area manajemen SDM.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi

pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

Tantangan dan peluang:

1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan peluang kepada BKD dalam pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian;
2. Dukungan regulasi mengenai manajemen aparatur sipil untuk meningkatkan kinerja layanan kepegawaian serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur sipil Negara;
3. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas melalui Pendidikan formal maupun non formal;
4. Dukungan regulasi mengenai penyelenggaraan promosi jabatan/seleksi jabatan secara terbuka dalam rangka pengembangan pola karir aparatur pemerintah daerah yang jelas dan terukur; dan
5. Dukungan regulasi mengenai sistem penggajian Aparatur Sipil Negara dari pusat.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen *talent pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang pola karier.

3. Melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat struktural agar penempatannya sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki.
4. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi ASN.
5. Membangun sistem/kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional.
6. Membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online dengan sistem kepegawaian lainnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Membangun dan mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian yang lain.
2. Menyusun dokumen *talent pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi dan kinerja).
3. Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang pola karir.
4. Melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat struktural dan pelaksana potensial agar penempatannya sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki.
5. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi ASN.
6. Membangun sistem/kebijakan perlindungan pegawai di luar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	Nilai SAKIP		74,00 BB	7.071.236.567	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	Nilai SAKIP		74,00 BB	6.616.000.000
		Nilai SKM		81,75			Nilai SKM		81,75	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	5.019.379.067	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	5.249.648.700
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan kepegawaian yang memadai		100%			Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan kepegawaian yang memadai		100%	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel		100%		Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel		100%	2.580.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dok	2.428.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dok	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	4.511.681.820
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 orang	4.211.279.662	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 orang	79.840.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dok	79.420.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dok	2.130.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 dok	2.428.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 dok	2.580.000
		Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun		1 dok			Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun		1 dok	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	10.993.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	10.993.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 paket	281.883.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 paket	218.252.300
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	0
	Pengadaan Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan		3 unit	28.082.000	Pengadaan Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan		3 unit	28.082.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	82.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	82.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	213.316.445	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	193.499.200
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	69.620.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	69.570.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	16.442.260	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	29.933.980

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		7 unit	20.685.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		7 unit	20.685.600
B.	URUSAN KEPEGAWAIAN	Nilai Penerapan Sistem Merit		0,71	1.247.054.500	URUSAN KEPEGAWAIAN	Nilai Penerapan Sistem Merit		0,71	871.047.300
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya		48%			Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya		48%	
2.	Program Kepegawaian Daerah	Presentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitive		85%	1.247.054.500	Program Kepegawaian Daerah	Presentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		85%	871.047.300
		Presentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		81%			Presentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		81%	
		Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		76%			Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		76%	
2.1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi		100%		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi		100%	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		2 dok	3.500.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		2 dok	5.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dok	503.500.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dok	265.650.000
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi		1 dok	6.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi		1 dok	20.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemberhentian					Pemberhentian			
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)		2 lembaga	75.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)		1 lembaga	50.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 dok	128.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 dok	128.000.000
2.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan struktural yang terisi		91%		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan struktural yang terisi		91%	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		4 dok	45.295.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		4 dok	45.294.500
		Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural		36%			Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural		36%	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2 dok	16.151.800	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		6 dok	24.995.000
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 dok	370.897.800	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 dok	180.897.800
		Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment</i>		1 dok			Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment</i>		1 dok	
2.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100%		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100%	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		5 orang	34.999.900	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		5 orang	47.500.000
2.4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin		100%		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin		100%	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 dok	15.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 dok	30.000.000
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		3 orang	43.710.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		0 orang	23.710.000
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		50 Orang			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		50 Orang	
		Jumlah ASN yg memperoleh pelayanan administrasi kesejahteraan ASN		1.200 orang			Jumlah ASN yg memperoleh pelayanan administrasi kesejahteraan ASN		1.200 orang	
		Jumlah pejabat yang menyampaikan pelaporan LHKPN		99 orang			Jumlah pejabat yang menyampaikan pelaporan LHKPN		99 orang	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		2 orang	50.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		2 orang	50.000.000
		Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani		15 orang			Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani		15 orang	
C.	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase pengembangan SDM aparatur		50%	804.803.000	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase Pengembangan SDM aparatur		50%	495.304.000
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		10jp	804.803.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		10jp	495.304.000
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		50%			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		50%	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		60%			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		60%	
3.1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		55%		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		55%	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		30 orang	473.628.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		20 orang	209.183.000
		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Ujian Kedinasan)		150 orang			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Ujian Kedinasan)		150 orang	
3.2	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		60%		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		60%	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan		50 orang	331.175.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan		4 orang	286.121.000
		Jumlah CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi latsar		0 orang			Jumlah CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi latsar		0 orang	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		2 laporan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		2 laporan	
					7.071.236.567					6.616.000.000

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang belum terlaksana di tahun 2021 belum dapat juga dianggarkan di tahun 2024.
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
3. Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dianggarkan untuk uji kompetensi peserta seleksi terbuka JPT serta uji kompetensi staf potensial dan pejabat struktural eselon III dan IV.
4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar dilaksanakan untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	N/A				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	N/A				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Visi Pembangunan Tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan yaitu Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat lima (5) fokus pembangunan yaitu :

1. Pembangunan Manusia, meliputi: Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial; SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Pembangunan Karakter Bangsa.
2. Pembangunan Ekonomi, meliputi: Pangan; Energi; dan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital.
3. Pembangunan Kewilayahan, meliputi: Sentra-sentra Pertumbuhan; Komoditas Unggulan Daerah; dan Pertumbuhan Perkotaan.
4. Pembangunan Infrastruktur, meliputi: Transportasi; Telekomunikasi; Sumber Daya Air; dan Perumahan dan Pemukiman.

5. Pembangunan Politik, Hukum dan Regulasi Pertahanan dan Keamanan, meliputi: Hukum dan Regulasi; Pertahanan dan Keamanan; dan Politik.

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan strategis di tingkat nasional dan internasional, khususnya untuk mengisi pelaksanaan otonomi daerah.

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur pada dasarnya adalah pembangunan sumber daya manusia aparatur yang profesional, netral dari pengaruh kekuatan politik, berwawasan global, bermoral tinggi, serta mempunyai kemampuan berperan sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa satu NKRI.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa BKN adalah lembaga pemerintah Non Kementrian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Undang-undang ini juga mengatur bahwa untuk menjadikan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip *merit* dalam pelaksanaan manajemen PNS yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja serta adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit, asal usul, jenis kelamin, umur dan kondisi kecacatan.

Salah satu kewenangan yang kemudian oleh pemerintah pusat diserahkan kepada daerah adalah kewenangan di bidang kepegawaian (desentralisasi di bidang kepegawaian), sehingga berdasarkan hal tersebut, kemudian daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pada Renstranya masing-masing.

BKD Kabupaten Banjarnegara merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembangunan urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

kapabilitas aparatur daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui perumusan kebijakan mengenai kepegawaian, pelaksanaan kebijakan mengenai kepegawaian, pelaksanaan administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan fungsi pembinaan kepegawaian lainnya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka BKD Kabupaten Banjarnegara di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di BKD Kabupaten Banjarnegara, maka dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di BKD Kabupaten Banjarnegara telah berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan telah berakhirnya masa perencanaan dalam Renstra 2017– 2022 dan belum disusunnya dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode berikutnya, maka Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025. Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 3 Tahun 2009.

Visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025 adalah :

“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur budaya masyarakat.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal

khususnya pertanian, yang berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada potensi lokal sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan yang sehat. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi regional yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekayaan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, meningkatnya kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mengurangi resiko bencana alam.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem dan iklim demokrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya kualitas tata air (air bersih, irigasi, bendung) yang mendukung terciptanya ketahanan pangan, meningkatnya jaringan infrastruktur jalan, transportasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi, wisata dan mampu membuka isolasi wilayah serta

membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, terpenuhinya perumahan yang layak huni yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya untuk mengatasi wilayah yang kumuh.

6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan menurunnya kuantitas dan kualitas penyandang sosial, meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kesatuan dan persatuan serta kerukunan masyarakat, meningkatnya perlindungan dan pengayoman masyarakat terhadap segala tindak kejahatan, menurunnya kasus kekerasan, berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum dan penegakan HAM.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. RPJM Daerah Pertama (2005 - 2009)
2. RPJM Daerah Kedua (2010 - 2014)
3. RPJM Daerah Ketiga (2015 - 2019)
4. RPJM Daerah Keempat (2020 - 2024)

Untuk rencana kerja tahun 2024 mengacu pada RPJMD Keempat, ditujukan untuk optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agropolitan, mencakup tahapan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada:

- a. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkompetensi, serta kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan iptek, jenjang pendidikan lebih tinggi, dan pangsa pasar kerja.
- b. Pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
- c. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor industri dan pertanian.
- d. Pengembangan riset yang mengarah pada penciptaan teknologi baru.
- e. Pemantapan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat.
- f. Pemantapan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan yang profesional, serta didukung oleh sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal.
- g. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
- h. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- i. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
- j. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional maupun internasional.

- k. Pemantapan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan fokus pada:
- a. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.
 - b. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
 - c. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.
 - d. Pemantapan kualitas dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
 - e. Meningkatkan keragaman kegiatan perekonomian kawasan agropolitan dan wilayah penyangganya.
 - f. Pembangunan industri yang terarah sesuai dengan kluster dan potensi di daerah yang bersangkutan, serta memperhatikan tata wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan teratur.
 - g. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
 - h. Pelestarian sumber daya genetis berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- i. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- j. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana.
- k. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- l. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
- m. Pemantapan kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan.
- n. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
- o. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
- p. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/ kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam membangun pertahanan negara dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
- q. Pemantapan perlindungan terhadap masyarakat, penghargaan yang tinggi terhadap penegakan hukum dan peradilan untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. Pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
 - c. Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
 - d. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM.
 - e. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
 - f. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Banjarnegara dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
 - g. Semakin terbukanya peluang investasi domestik atau investasi asing untuk masuk ke daerah melalui perbaikan iklim investasi dan kebijakan yang mendukung dengan adanya kemunculan kutub-kutub pertumbuhan yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian.
 - h. Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan saling mendukung satu sama lain serta sistem kelembagaan yang mantap dan terintegrasi.

- i. Memperluas kerja sama dengan institusi nasional atau internasional yang akan mendukung perkembangan industri pertanian. 10. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan antara perdesaan dan perkotaan.
- 4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang andal.
 - b. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup.
 - c. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
 - f. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya.

- g. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas 41 (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.
- h. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah kecamatan untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal.
- i. Penciptaan Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW Kabupaten) sebagai daerah pertanian yang memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi, dan tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tersebut, maka BKD sebagai OPD Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mendukung dengan menetapkan tujuan jangka menengah BKD, yaitu : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2.2 Sasaran :

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, Misi, dan Tujuan. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan, maka Sasaran yang akan dicapai adalah :

- 1) Meningkatnya profesionalitas ASN.
- 2) Meningkatnya kompetensi ASN.
- 3) Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien.

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan instrumen untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi BKD. Sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	Nilai SAKIP		74,00 BB	6.616.000.000	APBD		74,00 BB	9.134.860.404
		Nilai SKM		81,75				81,75	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	5.249.648.700	APBD		100%	5.137.360.404
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan kepegawaian yang memadai		100%				100%	
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel		100%	2.580.000	APBD		100%	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dok		APBD		5 dok	4.064.900
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	4.511.681.820			100%	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 orang	79.840.000	APBD		33 orang	3.998.495.504
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dok	2.130.000	APBD		1 dok	95.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		5 dok	2.580.000	APBD		5 dok	2.000.000
		Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun		1 dok				1 dok	
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%				100%	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	10.993.800	3 paket		3 paket	12.000.000
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 paket	218.252.300	9 paket		9 paket	400.000.000
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	0	APBD		1 unit	200.000.000
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 unit	28.082.000	APBD		3 unit	20.000.000
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	82.400.000	APBD		12 laporan	94.800.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	193.499.200	APBD		12 laporan	197.000.000
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	69.570.000	APBD		5 unit	60.000.000
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	29.933.980	APBD		2 unit	25.000.000
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		7 unit	20.685.600	APBD		7 unit	29.000.000
	URUSAN KEPEGAWAIAN	Nilai Penerapan Sistem Merit		0,71	871.047.300			0,72	
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya		48%				51%	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Presentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		85%				86%	1.417.500.000
		Presentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		81%				86%	
		Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		76%				80%	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi		100%				100%	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		2 dok	5.000.000	APBD		2 dok	5.000.000
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dok	265.650.000	APBD		1 dok	900.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		1 dok	20.000.000	APBD		1 dok	6.500.000
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)		1 lembaga	50.000.000	APBD		2 lembaga	50.000.000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 dok	128.000.000	APBD		2 dok	65.000.000
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan struktural yang terisi		91%				92%	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		4 dok	45.294.500	APBD		4 dok	50.000.000
		Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural		36%				37%	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		6 dok	24.995.000	APBD		2 dok	20.000.000
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 dok	180.897.800	APBD		2 dok	200.000.000
		Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment</i>		1 dok				1 dok	
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100%				100%	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		5 orang	47.500.000	APBD		5 orang	45.000.000
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin		100%				100%	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 dok	30.000.000	APBD		1 dok	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		3 orang	23.710.000			3 orang	55.000.000
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		50 Orang		APBD		50 Orang	
		Jumlah ASN yg memperoleh pelayanan administrasi kesejahteraan ASN		1.200 orang				1.200 orang	
		Jumlah pejabat yang menyampaikan pelaporan LHKPN		99 orang				99 orang	
5.03.02.2.04.04	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		2 orang	50.000.000	APBD		2 orang	6.000.000
		Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani		15 orang				15 orang	
5.04	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase Pengembangan SDM aparatur		50%	495.304.000			60%	
5.04.01	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		10jp	495.304.000			10 jp	2.580.000.000
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		50%				60%	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		60%				70%	
5.04.01.1.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		55%				60%	
5.04.01.1.01.04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		20 orang	209.183.000	APBD		30 orang	80.000.000
		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Ujian Kedinasan)		150 orang				150 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Umum								
5.04.01.1.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		60%				70%	
5.04.01.1.02.04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan		4 orang	286.121.000		diklat latsar,	50 orang	2.500.000.000
		Jumlah CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi latsar		0 orang				500 orang	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		2 laporan				3 laporan	
					6.616.000.000				9.134.860.404

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/kegiatan diuraikan sebagai berikut

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

III. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 31 Juli 2023

Plh. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. ARIF SUHANDA

Pembina Tk. I

NIP. 19660905 199603 1 001

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahkmat dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 mencakup analisa hasil renja dan hasil evaluasi Renja tahun lalu. Perumusannya terdiri dari Pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Bakesbangpol dan Rencana Kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, 20 Juli 2023

Plt. KEPALA BAKESBANGPOL

KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. TULUS SUGIHARTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670217 199303 1 101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah

dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
6. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
7. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang –Undang nomor 17 tahun 2011 tentang Inelejen Negara;
10. Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Propinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 3)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 nomo2 Seri E)

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah no 5 th 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 (lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 no 5, tambahan lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 110)
24. Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara no 3 th 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang / RPJP daerah Kabupaten Banjarnegara 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara no 1 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah no 3 th 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah kabupaten banjarnegara 2005-2025 (lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara th 2012 no 2 seri E)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 nomor 1 Seri E, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 145)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor

- 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24,)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
31. Permendagri No 86 Tahun 2017. tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Permen Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
34. Peraturan menteri dalam negeri no 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah th 2022
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
36. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara
37. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026
38. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor.15 Tahun.2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
39. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan

review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 6 program, 11 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 18.846.769.760 -, dengan fokus utama pada Pembangunan manusia melalui peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan dasar yaitu dengan meningkatkan pendidikan budi pekerti dan wawasan kebangsaan sejak dini. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Keterbatasan personil yang belum memadai dan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlu penguatan dukungan Kebijakan dan anggaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan reealisasi program dan kegiatan
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kondusivitas wilayah dan ketentraman dan keamanan lingkungan.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang wawasan kebangsaan.
5. Masih rendahnya penahaman masyarakat di bidang politik terutama bagi pemilih pemula dan pekerja sektor informal.

6. Masih maraknya pergaulan bebas dan minuman keras di masyarakat yang bisa membahayakan bagi remaja/pelajar dan sulitnya mengidentifikasi komunitas penyalahgunaan narkoba

Dari 6 program, 11 kegiatan, dan 21. sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 6 program, 10 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp, 18.846.769.760 -

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 6 program, 10 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.9.518.575.948,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan tidak ada penambahan tapi adanya refocusing dan pergeseran anggaran terutama yang ada di belanja honor tim kegiatan, honor pengelola keuangan, uang tranpot peserta, standar belanja makan dan minum, adapun yang bertambah meliputi belanja gaji ASN adanya tunjangan dan kenaikan pangkat, belanja jasa listik, belanja pemeliharaan kendaraan dinas,

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program /kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan meliputi

1. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Dengan target 4 orang, terealisasi 3 orang (PTT 2 orang dan THL 1 orang), sehingga ada 1 kekosongan THL dan anggaran masih dimunculkan.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan (Bela Negara) dengan target peserta 300 orang terealisasi 150 orang. yang rencana akan dilaksanakan 3x , dimana kegiatan 2 kali dilaksanakan pada perubahan anggaran, sehingga ada 1 kegiatan yang tidak diselenggarakan karena waktu yang tersedia tidak cukup.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (FKUB)
Dengan target 40 kelompok, kegiatan selama 4 kali, namun terealisasi 30 kelompok melalui 3 kali pertemuan forum, sehubungan dengan waktu yang tersedia tidak cukup sampai batas akhir tahun tidak bisa dilaksanakan sehingga kegiatan belum memenuhi target.
4. Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Hibah Ormas) dengan target 4 Ormas, terealisasi 2 ormas. Karena ada 2 (dua) lembaga yang belum berbadan hukum. Sehingga ada pengembalian dan realisasi belum memenuhi target yang diharapkan.
5. Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Disepakatinya rumusan pola (Formula) baru, kegiatan Forkompinda pada menjelang akhir triwulan ke tiga 2021

pasca diterbitkannya Perpres 33 tahun 2020 khususnya terkait larangan pemberian honorarium kegiatan. Adanya perpres no 33 tahun 2020 tidak diperkenankan memberikan honor kepada forkompinda

Faktor-faktor yang mempengaruhi **ketidaktercapaian** tersebut antara lain adalah

1. Anggaran yang sudah direncanakan mengalami penyesuaian/Refocusing beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dan pergeseran untuk menunjang operasional perangkat daerah ahirnya dalam APBD Perubahan dajukan pengurangan dan pergeseran anggaran.
2. Terkendala dengan aturan Perpres 33 Tahun 2020 terkait dengan pemberlakuan larangan pemberian Honorarium bagi tim kegiatan.
3. Adanya Lembaga Ormas yang belum berbadan Hukum.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah **memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:
 1. Penyusunan dokumen perencanaan poerangkat daerah telah memenuhi target 10 dok.
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan targer 16 orang, realisai target 16 org.
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD dari target 7 orang terealisasi 7 orang.
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari target 16 paket, teralisasi 16 pakat.
 5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 3 paket terealisasi 3 pkt.
 6. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan target 3 paket trealisasi 3 pkt.
 7. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dan atau kendaraan dinas jabatan dengan target 8 unit, terealisasi.8 unit.

8. Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 24 unit.
9. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (Penyuluhan kepada masyarakat) dengan target 4 pokmas, terealisasi 4 pokmas.
10. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (Hibah Parpol) dengan target 10 Parpol, terealisasi 10 Parpol.
11. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (forum diskusi politik) dengan target 100 orang peserta terealisasi 100 orang
12. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (fasilitasi Ormas) dengan target 20 ormas/LSM, terealisasi 20 ormas/LSM.
13. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan target 2 konflik, terealisasi 3 konflik tertangani.

14. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah FKDM) dengan target 2 kali kegiatan, terealisasi 2 kegiatan
- c. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Verifikasi dan monev banparpol) dari target 9 parpol terealisasi 10 parpol Target 9 parpol dalam Renstra merupakan hasil pemilu Tahun 2019 . Dari hasil Pemilu 2019 terdapat 10 parpol yang mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Banjarnegara dan telah mendapatkan banparpol.
 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Kominda) dengan target 600 Laporan Informasi Harian /LIH. Dan ada peningkatan jumlah laporan yang masuk dan ditindaklanjuti dengan terealisasi sampai akhir tahun 805 LIH.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

- 1) Kerjasama yang harmonis dan koordinasi yang baik antara Tim pengelola kegiatan dan Pengguna Anggaran.

- 2) Terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah/Instansi terkait dalam ikut serta menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, sehingga situasi kondusif di wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat terjaga.
- 3) Terbangunnya komunikasi yang baik antara pemeluk agama dengan masyarakat dan pemerintah serta dengan dibentuknya Forum Kurukunan Umat Beragana,/FKUB dalam upaya menghindari konflik agama, sehingga bisa mendukung kondusivitas wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- 4) upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang keamanan lingkungan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat.
- 5) Anggaran banparpol dipertanggungjawabkan sesuai dengan rincian anggaran dan belanja berdasar permohonan /proposal yang diajukan oleh penerima banparpol.
- 6) Monitoring/pemantauan dan koordinasi dengan pihak –pihak terkait dalam upaya menjaga keamanan dan ketentraman.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara dengan pihak-poihak terkait untuk mengkaji peran masyarakat terutama generasi pemuda dengan terus memberikan pemahaman dan wawasan tentang Idiologi Pancasila, UUD 1945 dan moralitas perlu pembekalan tentang idiologi Pancasila agar mempunyai jiwa Nasionalisme dan tetap tegaknya NKRI. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik bagi masyarakat, pelajat, tokoh masyarakat serta tokoh agama
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesatuan Bangsa dan politik

3. Pendampingan kepada pengelola banpol dalam penyusunan RAB dan pertanggungjawaban banpol melalui rapat forum dan konsultasi maupun monev
4. Meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan perkembangan situasi wilayah, dalam upaya pencegahan terjadinya konflik sosial di masyarakat

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

[illegible]

8.0 1.0 1	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Prosentase terlayannya administrasi Perkantoran Nilai SAKIP	100% B	100% B (63,10)	100% B (60,08)	100% B 63,33)	100% 105,40	100% B (60,08)	100% 63.33	100% 105,40
8.01 .2.0 2.01	<i>Kegiatan.Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Prosentase penyampaian laporan dan ikhtisar capaian SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01 .2.0 1.01	Sub Kegiatan.Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan laporan capaian kinerja yg disusun	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100%	10 dok	10 dok	100%
8.01 .2.0 2	<i>Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah</i>	Prosentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

	<i>urusan pemerintahan daerah</i>	prasarana aparat								
8.01 .2.0 8.02	Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	3 laporan	3 pkt	3 pkt	3 pkt	100%	3 pkt	3 pkt	100%
8.01 .2.0 8.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Honor PTT THL yang terbayar	5 orang	3 orang	5 orang	3 orang	60 %	3 org	3 org	100%
8.01 .2.0 9	<i>Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	Prosentase Sarana dan Prasarana yang tersedia	100%	-	-	-	-	-		
8.01 .08. 09.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 paket (Laptop, Korden, Meja kusi tamu)	4 unit	-	-	-	-	3 unit	100%
8.01 .2.1 0	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.</i>	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipelihara	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%

8.01 .2.0 9.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.....	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
8.01 .2.0 9.02	Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabil itasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	100%	24 unit	24 unit	
8.01 .02	Program Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok yang mendapat pembinaan Bela negara	100%							
8.01 .02. 2.01	<i>Keg Perumusan kebijakan tehnik dan peemantapan pelaksanaan bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>									
8.01 .02. 2.01 .04	Sub Keg: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang idiologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan	jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti	200 org	300 or	300 or	150 org	50%	300 or	2300 org	100%

	pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu Kepala Daerah serta penerintahan situasi politik.									
8.01 .03. 01.0 2	Sub Keg.Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta penerintahan situasi politik di daerah. (Penyuluhan kepada masyarakat)	Jumlah Pokmas yang mengikuti Pendidikan Politik	orang	-	4 pokmas	4 pokmas	100%	4 pokmas	-	-
8.01 .03. 01.0 3.	Sub Keg.Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,	Jumlah Partai Politik yang mendapat	10 dok	-	10 parpol	10 parpol	100%	10 parpol	10 parpol	100%

	peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu Kepala Daerah serta pemantaun situasi politik didaerah (Bantuan Hibah uanga kepada Partai politik	Hibah bantuan keuangan								
8.01 .03. 01.0 4	Sub Keg. Plaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokt\ rasi, fasilitasi kelembagaan pemerinatahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu Kepala Daerah peserta pemantauan situasi politik didaerah (Koordinasi forum forum diskusi politik	Jumlah masyarakat yang mengikuti diskusi politik	200 org	-	100 or	100 or	100%	100 or	100 org	100%
8.01 .03. 01.0 5	Sub Keg. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik , etika budaya	Jumlah partai politik yang difasilitasi	10 lap	-	9 parpol	10 parpol	111 %	10 parpol	10 parpol	100%

	politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perswakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (Verifikasi dan pemeriksaan persyaratan Banpol)	mendapat bantuan								
8.01 .04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Jumlah Ormas/LSM yang diberikan SKT	100%	76% (19 orms/25x100)	100%	88 (22ormas/25x100)	88%	100%	100%	100%
8.01 .04. 2.01	<i>Keg perumusan tehns dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>									
8.01 .04. 2.01 .03	Sub Keg.Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas ,	Jumlah Ormas/LSM yang mendapat bantuan hibah uang.	1 dok	-	14 ormas/LSM	13 ormas/LSM	92,8%	14 ormas	12 ormas	100%

	pengawasan dan ormas asing didaerah (Hibah kepada ormas, LSM)									
8.01 .04. 2.01 .05	Sub Keg.Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan dan ormas asing didaerah (Fasilitasi Ormas, LSM, parpol dan OKP Bangtuan Hibah kepada Ormas/LSM	Jumlah Ormas yang difasilitas	100 org	-	20 ormas	20 ormas	100%	25 ormas	25 ormas	100%
8.01 .05	Program pembinaan dan pengembangan Ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan P4GN	25%-	-	15%	17,9% (24/134X100)	119%	15%	15%	100%
		Berkurangnya jumlah konflik agama	Jumlah konflik agama yang timbul 1 konflik	0	1 konflik	0	0	1 konflik		

8.01 .05. 2	Keg: Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya									
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (P4GN)	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan P4GN	25%	-	24 sklh	24	100%	24 sklh	29 sekolah	100%
8.01 .05. 2.01 .05	Sub Keg. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Peningatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama/FKUB)	Jumlah Pokmas yang mendapat pembinaan kerukunan beragama	2 lap (gab 2 sub keg POA & FKUB)	-	40 klpk (200 or)	30 klmpk (150 or)	75%	40 klpk	40 kelmpk	100%

8.01 .06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Berkurangnya jumlah konflik masyarakat	%	3 konflik	2 konflik	2 konflik	100%	1 konflik	0 konflik	100%
8.01 .06.	Keg Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial									
8.01 .06. 2.01 .02	Sub Keg. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelegen, pamanatauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah (penangan konflik)	Jumlah potensi dan konflik yang tertangani (data 17 konflik	80 org	11 konflik	3 konflik	3 konflik	100%	5 konflik	0 konflik	100%

8.01 .06. 2.01 .03	Sub Keg.Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelegen, pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah (Pemberdayaan Kominda/wasdinda)	Jumlah Laporan Informasi Harian (LIH) yang termonitor wasdinda	12 dok	-	600 LIH	805 LIH	134%	600 LIH	600 LIH	100%
8.01 .06. 2.01 .04	Sub Keg.Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelegen, pemanatauan orang asing, Tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik diderah (FKDM)	Jumlah fasilitasi FKDM	2 dok	-	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mengampu 5 Indikator. Dari 4 indikator tersebut, berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Dan 1 indikator Urusan Administrasi Pemerintahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Belum tercapainya indikator Persentase peningkatan jumlah ormas/LSM yang diberikan SKT dari target **25 ormas** dan yang mengajukan keberadaan ormas di Bakesbangpol th 2022, ada **22 ormas** sehingga target belum terpenuhi.
2. Indikator Berkurangnya jumlah konflik masyarakat Dari target 1 konflik masyarakat Th 2022 tidak ada konflik yang ditangani atau relaisasi 0 konflik, sehingga capaiannya 100%
(Rumus pengitungan capaian: apabila semakin besar realisasi menunjukan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukan kinerja yang semakin baik)
3. Indikator Berkurangnya jumlah konflik agama Dari Target 1 konflik agama Th 2022 tidak ada konflik agama yang tertangani atau 0 konflik, sehingga capaiannya 100%
(Rumus capaian sama dengan Rumus Konflik Masyarakat)
4. Indikator Persentase sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dari target 100% dengan bertambahnya jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan sehingga realisasi capaian 117% .
5. Indikator Prosentase Pemilih dalam Pemilu Tahun 2022 tidak Pemilu, sehingga kegiatan tidak bisa terealisasi
6. Kegiatan Rapat koordinasi anggota Forkopimda dan terlaksana sesuai target

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Mempertahankan usulan dalam program/Kegiatan/Sub kegiatan yang merupakan prioritas program khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Banjarnegara
2. Akan lebih selektif dan teliti dalam membuat perencanaan program anggaran untuk tahun berikutnya.
3. Perlu penguatan Dukungan Kebijakan dan anggaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan realisasi progran dan kegiatan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan jumlah ormas/LSM yang diberikan SKT	-		-	100%	100%		100%	-	76%	88%	100%		Belum mencapai dari target 25 ormas karena, yang mengajukan keberadaan ormas di Bakesbangpol th 2021, 22 ormas / <i>melebihi di tahun 2022</i>
	Persentase Cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan keberadaan ormas				-	-		25%	50%	-	-	-	100%	
2	Berkurangnya jumlah konflik masyarakat	-		-	2	1		1	1	3	0 konflik =100%	100%	-	Dari target 2 konflik masyarakat dari Th 2021 tidak ada konflik yang

														ditangani, sehingga capaiannya 100% Rumus penghitungan capaian: apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik Capaian= (2 x target) dikurangi realisasi / target x100%
	Persentase penanganan konflik			-	-	-		25 %	25%	-	-	-	100%	
3	Berkurangnya jumlah konflik agama	-		-	1	1		1	1	0	0 konflik =100%	100%		Dari target 1 konflik agama, Th 2021 tidak ada konflik yang ditangani, sehingga capaiannya 100% (Rumusan capaian sama dengan konflik Masyarakat)

	Persentase Ormas (yang terdaftar dikesbangpol yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/I diologi Pancasila				-	-		25 %	25%	-	-	-	100%	
4	Persentase sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	-		-	15%	15%		-	-	0	15, % (24/1 34x10 0)	17,9%	100%	Sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari target 15% dengan capaian 17,9% adanya penambahan jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan.
	Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahguna				-	-		25 %	25%	-	-	25%	100%	

	n dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)													
5	Prosentase Pemilih dalam Pemilu				-	Pilbup 70-75%			Pilpr s, pileg ,pilb up pilg ub.	0	0	0	-	Tahun 2021 tidak Pemilu, sehingga kegiatan tidak bisa terealisasi
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik				-	-		25 %	25%	-	-	-	100%	
6	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah				1 th (1 keg)	1 th (1 keg)		-	-	-	1 th)1 keg)	100%	-	Kegiatan Rapat koordinasi anggota Forkopimda terlaksana sesuai target.

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu. urusan, yaitu Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup satu urusan tersebut.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Keterbatasan personil yang belum memadai dan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlu penguatan dukungan Kebijakan dan anggaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan reealisasi progran dan kegiatan.
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kondusivitas wilayah dan ketentraman dan keamanan lingkungan
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang wawasan kebangsaan
5. Masih rendahnya penahaman masyarakat di bidang politik terutama bagi pemilih pemula dan pekerja sektor informal.
6. Masih maraknya pergaulan bebas dan minuman keras di masyarakat yang bisa membahayakan bagi remaja/pelajar dan sulitnya mengidentifikasi komunitas penyalahgunaan narkoba.
7. Perlu penguatan Dukungan Kebijakan dan angaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan rfealisasi progran dan kegiatan .

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Situasi wilayah tidak kondusif
2. Munculnya konflik di masyarakat.
3. Kecenderungan terjadinya degradasi nilai nilai kebangsaan di masyarakat.
4. Potensi berkembangnya paham paham ideologi diluar Pancasila (paham radikal).
5. Pendirian tempat ibadah yang terindikasi aliran garis keras yang menjadi pemicu konflik agama dimasyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

Peluang Eksternal

a. Adanya nilai nilai luhur dari personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1. Terbitnya Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih memperkuat keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24 lebih memperkuat keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah sebagaimana Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peluang Internal

a. adanya nilai-nilai luhur dari personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Kerjasama, artinya komitmen diantara personil yang diperlukan untuk mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi, misi dan juga menghindari ego sektoral dan mementingkan bidangnya sendiri dengan mengorbankan tujuan bersama, dengan kata lain diperlakukan kerjasama yang harmonis antara bidang dengan sekretariat untuk mewujudkan visi misi
2. Disiplin, artinya bahwa setiap personil Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara harus memegang komitmen untuk mempunyai sikap dan perilaku mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku yaitu senantiasa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
3. Tangung jawab, artinya didalam melaksanakan pekerjaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan selalu dibarengi dengan rasa penuh tanggungjawab dengan kata lain sikap bersedia dan untuk menanggung akibat atas perilaku dan perbuatan yang dilakukan.
4. Pengabdian, artinya sebagai unit pelayanan maka dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata didasarkan penghargaan imbalan materi, namun harus diutamakan pengabdian, rela berkorban tenaga, waktu dan biaya sekalipun.

b. Adanya 12 (dua belas) Etika Budaya malu yang digalakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu

penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahayanya pemakaian/pengguna maupun pengedar narkoba dan sejenisnya.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula dan pekerja sektor informal
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan ideologi kebangsaan
5. Masih adanya kejadian kesalah pahaman di masyarakat, sehingga dapat menimbulkan suatu konflik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Pembangunan manusia melalui peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan dasar melalui Memantapkan pendidikan budi pekerti dan wawasan kebangsaan sejak dini.
2. Penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pemahanan pertahanan keamanan di Kabupaten Banjarnegara bisa berjalan aman , lancar tanpa diikuti konflik yang menonjol.

Hal tersebut yang menjadikan roh yang menjadi satu isu strategi terkait Tupoksi Bakesbangpol.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kab.Bna	Nilai SAKIP, Survey Kepuasan Masyarakat(SKM)	B 84,34	2.303.490.580	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Nilai SAKIP, Survey Kepuasan Masyarakat(SKM)	B 84,34	2.867.563.580	
1)	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah		Prosentase penyampaian laporan atau Ikhtisar Capaian realisasi SKPD	100%	100.000.000	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah		Prosentase penyampaian laporan atau Ikhtisar Capaian realisasi SKPD	100%	10.000.000	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dok	10.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dok	10.000.000	
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.986.874.800	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.497.947.800	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	16 org/14 bl	1.920.976.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	16 org/14 bl	2.371..887.800	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD		Jumlah dokumen penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bl	65.898.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD		Jumlah dokumen penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bl	126.060.000	
3)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase terlayannya Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	110.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase terlayannya Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	140.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16 pkt	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16 pkt	130.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	10.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 pkt	10.000.000	
4)	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%	112.615.780	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%	115.615.780	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 lap	12.000.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 lap	15.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (PTT)		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	100.615.780	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (PTT)		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 lap	100.615.780	
5)	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>		<i>Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	57.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		<i>Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	57.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	3 unit	57.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	3 unit	57.000.000	untuk meja kursi tamu di ruang kepala, pembelian gordena kantor untuk laptop kepala
6)	<i>Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Prosentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur</i>	100%	27.000.000	<i>Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Prosentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur</i>	100%	47.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	8 unit	15.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	8 unit	25.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	operasional atau lapangan		dibayarkan pajak dan perizinan					dibayarkan pajak dan perizinan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	24 unit	12.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	24 unit	22.000.000	
B	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	50.000.000	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase ormas yang terdaftar dikesbangpol yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/ideologi pancasila	25%	50.000.000	pembinaan generasi muda yang berbentuk sosialisasi , karang taruna untuk narsum moderator 2 orang x 4 kegiatan, manmin, transport
7)	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	50.000.000	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	50.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan (<i>Pembinaan Bela Negara</i>)		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Belanegara, karakter kebangsaan, bHineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan	200 org	50.000.000	Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan (<i>Pembinaan Bela Negara</i>)		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Belanegara, karakter kebangsaan, bHineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan	200 org	50.000.000	
	Sub Keg. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembaharuan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan (<i>POA</i>)		Jmh laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wasbang kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembaharuan kebangsaan, Bhineka, Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	..1 laporan	10.000.000	Sub Keg. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembaharuan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan (<i>POA</i>)		Jmh laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wasbang kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembaharuan kebangsaan, Bhineka, Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan		-	
C	Program Peningkatan Peran Oartai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	25%	1.691.798.000	Program Peningkatan Peran Oartai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				1.696.798.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8)	Keg.Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik	100%	1.691.798.000	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.696.798.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan bahan Perumusan bahan perumusan kebijakan dibiidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi		Jumlah kebijakan dibiidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik didaerah	10 dok.	1.581.798.000	Sub Kegiatan Penyusunan bahan Perumusan bahan perumusan kebijakan dibiidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik didaerah		Jumlah kebijakan dibiidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik didaerah yang disusun.	10 dok	1.581.798.000	hibah ke parpol dibagi 10 parpol dengan nominal berdasarkan perolehan suara . Cara perhitungannya perolehan suara @3000

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	politik didaerah (hibah parpol)										
	Sub Keg. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Koordinasi forum-forum diskusi politik		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 org	100.000.000	Sub Keg. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Koordinasi forum-forum diskusi politik		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 org	100.000.000	Gabungan dari 2 sub keg.(dikpol+Forum) diskusi poltik
	Sub Keg. Pelaksanaan Monev dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,Pemilu/Pemilu		Jumlah laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,	10 lap	10.000.000	Monev dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta		Jumlah laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,	10 lap	15.000.000	untuk tim verifikasi hibah parpol untk honor. Tim terdiri inspektorat , bpkad. rakor pertanggungjawaban hibah parpol untuk 2x pertemuan . 1

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepala Daerah serta Pemanatauan situasi politik di daerah (Penelitian Banparpol)		perwakilandan partai politik,Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta Pemanatauan situasi politik di daerah			Pemanatauan situasi politik di daerah		perwakilandan partai politik,Pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta Pemanatauan situasi politik di daerah			parpol mengundang 2 org
D	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Peningkatan Jumlah Ormas/ LSM yang ber Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	100%	30.000.000	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Cakupan Ormas yang diberi surat Keterangan keberadaan ormas	25%	16.287.000.000	
9)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	30.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	16.287.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	-4 dok	-	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan ormas dan		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas,	4 dok	16.257.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ormas Asing di Daerah (Hibah ormas)		Asing di Daerah yang Disusun			ormas asing di Daerah(Hibah ormas)		pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah (Fasilitasi Ormas)		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	100 org	30.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah (Fasilitasi Ormas)		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	100 org	30.000.000	fasilitasi pembinaan ormas, sosialisasi penerimaan hibah ormas penerima hibah
E	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase orang yang mendapatkan pembinaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	25%	145.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase orang yang mendapatkan pembinaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	25%	145.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10)	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya		Pesentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	145.000.000	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya		Pesentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	145.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah(P4GN)		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		50.000.000	
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi KUB,		Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi pencegahan	.2 lap	95.000.000	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi KUB,		Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi pencegahan	2. lap	95.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan penghayat kepercayaan di Daerah (FKUB)		penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi KUB, dan penghayat kepercayaan di Daerah			dan penghayat kepercayaan di Daerah (FKUB)		penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi KUB, dan penghayat kepercayaan di Daerah			
F	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Presentase penanganan konflik	25%	479.150.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Presentase penanganan konflik	25%	479.150.000	
11)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	479.150.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%		
	Penyusunan Program Kerja Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang		Jumlah dokumen program kerja Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	2 dok	40.000.000	Penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan, serta		Jumlah dokumen program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	2 dok	40.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (FKDM)		Kelembagaan bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun			Penanganan Konflik di Daerah		Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun			
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (Kominda)		Jumlah kebijakan di bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	12 dok	150.000.000	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (Kominda)		Jumlah kebijakan di bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	.12 dok	150.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kembagaan bidang		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	80 orang	30.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kembagaan bidang		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bid Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	.80 org	30.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (konflik)		Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah			kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah		Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jmh dok hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dok	259.150.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12.dok	259.150.000	
	JUMLAH				4.699.438.580	JUMLAH				21.525.511.580	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

- 1. Masih kurangnya ketersediaan Sumberdaya Manusia yang profesional untuk mendukung percepatan kinerja yang optimal.
- 2. Ketersediaan sumberdaya anggaran belum optimal untuk mendukung pencapaian program kegiatan yang menyangkut program prioritas.
- 3. Belum memudahinya sarana dan prasarana kerja agar diperoleh hasil kerja yang optimal sesuai dengan yang ditargetkan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Nihil				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Program Peningkatan Peran Oartai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kab.Banjarnegara			
	<i>Kegiatan.Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>				
	Sub Kegiatan Penyusunan bahan Perumusan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendidkan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/ Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik didaerah (hibah parpol)		Jumlah kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/ Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik didaerah	Suara sah Parpol DPRD x besaran nilai per suara sah (527.266 suara x Rp.3000,- = Rp.1.581.798.000	Mengacu pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 yaitu bedasrakan suara sah hasil pemilu parpol yang mendapat kursi DPRD dikalikan besaran nilai Banparpol /per suara sah sesuai SK Penetapan Gubernur Jawa Tengah
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidkan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/ Pemilu Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik didaerah (dikpol)		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Rp.50.000.000 ,-	Sosialisasi Pendidikan Politik dilakukan untuk menyiapkan pemilih serentak tahun 2024 berintegrasi , Sosialisasi dilakukan terhadap Penelenggaraan Pemilu/ Pemilihan (KPU) dan Bawaslu Kab), OPD terkait,

			Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah		dan Partai Politik di Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 20 Juni di Pringgitan Rumah Dinas Bupati.
2	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab.Banjarnegara			
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>		<i>Persentase Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>		
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Hibah ormas)		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	bantuan untuk 3 Ormas dan Yayasan di Kab. Banjarnegara sebesar: Rp.16.257.000.000,-	Masukan dari usulan melalui pokok pokok pikiran anggota legiaslatif Kabupaten Banjarnegara menjadi acuan dasari program/kegiatan /Sub Kegiatan Th.2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025, arah kebijakan umum pembangunan nasional pada periode jangka menengah ke-4 (Tahun 2020 – 2024) adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra

intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;

mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan **urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan politik** agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara:

Dengan telah berakhirnya masa perencanaan dalam Renstra 2017 – 2022 dan belum disusunnya dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode berikutnya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025. Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 3 Tahun 2009.

Visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025 adalah :

“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) **misi** pembangunan sebagai berikut

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama, budaya masyarakat.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal khususnya pertanian, yang berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada potensi lokal sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan yang sehat. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi regional yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekayaan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, meningkatnya kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat

dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mengurangi resiko bencana alam.

4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem dan iklim demokrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya kualitas tata air (air bersih, irigasi, bendung) yang mendukung terciptanya ketahanan pangan, meningkatnya jaringan infrastruktur jalan, transportasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi, wisata dan mampu membuka isolasi wilayah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, terpenuhinya perumahan yang layak huni yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya untuk mengatasi wilayah yang kumuh.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan menurunnya kuantitas dan kualitas penyandang sosial, meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kesatuan dan persatuan serta kerukunan masyarakat, meningkatnya perlindungan dan pengayoman masyarakat terhadap segala tindak kejahatan, menurunnya kasus kekerasan, berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum dan penegakan HAM.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. RPJM Daerah Pertama (2005 - 2009)
2. RPJM Daerah Kedua (2010 - 2014)
3. RPJM Daerah Ketiga (2015 - 2019)
4. **RPJM Daerah Keempat (2020 - 2024)**

Untuk rencana kerja tahun 2024 mengacu pada RPJMD Keempat, ditujukan untuk optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agropolitan, mencakup tahapan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada:
 - a. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkompetensi, serta kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan iptek, jenjang pendidikan lebih tinggi, dan pangsa pasar kerja.
 - b. Pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi.

- c. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor industri dan pertanian.
 - d. Pengembangan riset yang mengarah pada penciptaan teknologi baru.
 - e. Pemantapan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat.
 - f. Pemantapan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan yang profesional, serta didukung oleh sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal.
 - g. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
 - h. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
 - i. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
 - j. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional maupun internasional.
 - k. Pemantapan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan fokus pada:
- a. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.

- b. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
- c. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.
- d. Pemantapan kualitas dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
- e. Meningkatkan keragaman kegiatan perekonomian kawasan agropolitan dan wilayah penyangganya.
- f. Pembangunan industri yang terarah sesuai dengan kluster dan potensi di daerah yang bersangkutan, serta memperhatikan tata wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan teratur.
- g. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
- h. Pelestarian sumber daya genetis berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- i. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- j. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana.
- k. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- l. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.

- m. Pemantapan kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan.
 - n. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
 - o. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
 - p. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam membangun pertahanan negara dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
 - q. Pemantapan perlindungan terhadap masyarakat, penghargaan yang tinggi terhadap penegakan hukum dan peradilan untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. Pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
 - c. Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang

mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

- d. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM.
 - e. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
 - f. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Banjarnegara dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
 - g. Semakin terbukanya peluang investasi domestik atau investasi asing untuk masuk ke daerah melalui perbaikan iklim investasi dan kebijakan yang mendukung dengan adanya kemunculan kutub-kutub pertumbuhan yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian.
 - h. Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan saling mendukung satu sama lain serta sistem kelembagaan yang mantap dan terintegrasi.
 - i. Memperluas kerja sama dengan institusi nasional atau internasional yang akan mendukung perkembangan industri pertanian.
10. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan antara perdesaan dan perkotaan.
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang andal.

- b. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup .
- c. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya.
- g. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas 41 (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.
- h. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah kecamatan untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal.

- i. Penciptaan Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRWKabupaten) sebagai daerah pertanian yang memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi, dan tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Untuk mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara sebagai OPD teknis dalam urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung dengan menetapkan tujuan jangka menengah Bakesbangpol, yaitu

1. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
2. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Meningkatkan kualitas layanan publik

Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, Misi, dan Tujuan. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan, maka Sasaran yang akan dicapai adalah

- a. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah.
- b. Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam Politik dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
- c. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- d. Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik

3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjaregara Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 sebagai berikut:

8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				25%									
8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (P4GN)	Persentase Ormas (yang terdaftar dikesbang) yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peserta yang mengikuti pembinaan Bela negara	Banjarnegara		200 ORG	Peserta yang mengikuti pembinaan Bela negara	50,000,000	Apbd ii		200 org	50,000,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(POA)		Jumlah laporan hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi 5 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen penelitian yang diterbitkan	Banjarnegara		12 lap	0		Digabung dg sub keg FKUB		25.000.000	25.000.000
8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				25%			0		Apbd ii			25,000,000	
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan													
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (Hibah Parpol)	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Jumlah dokumen penerima bantuan hibah parpol	Banjarnegara		10 dok	Jumlah dokumen penerima bantuan hibah parpol	1.581.7980,000	APBD II		10 dok	1.599.200.000
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (forum diskusi politik)		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan dan diskusi politik	Banjarnegar		200 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan dan diskusi politik	100.000.000	APBD II		200 Orang	50.000.000
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (penelitian banparpol)		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tersusun	Banjarnegara		10 lap	Jumlah hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tersusun	15.000.000	APBD II		10 lap	50.000.000
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				25%									
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan													
8	01	04	2.01	02	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan keberadaan ormas	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah dokumen penerima bantuan hibah ormas	Banjarnegara		1 dok	Jumlah dokumen penerima bantuan hibah ormas	16.257.000.000	APBD II		1 dok	14.970.000.000

Unit

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) Hasil desk		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01			PERENCANAAN													
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100%									
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang ttersusun	dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, RKT, KAK, RTP, POK, PK, UKIIP	Kab.Banjarnegara	10 dokumen	dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, RKT, KAK, RTP, POK, PK, UKIIP	10,000,000	APBD II		10 dokumen	15,000,000	
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunggangan ASN	Terlayannya Gaji dan tunjangan ASN	Kab.anjarnegara	16 org/14 bl	Terlayannya Gaji dan tunjangan ASN	2,371,887,800	APBD II		16 org/14 bl	1.923.976.580	
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	honor pengelola keuangan yang terbayarkan	Kab.Banjarnegara	12 bl	honor pengelola keuangan yang terbayarkan	126,060,000	APBD II		12 BL	67.898.000	
8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Banjarnegara	3 paket	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000	APBD II		3 paket	11,000,000	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik kantor dan terfasilitasinya perjalanan dinas	Terpenuhinya bahan logistik kantror	Kab.Banjarnegara	16 paket	Terpenuhinya bahan logistik kantror	130,000,000	APBD II		16 paket	104,000,000	
8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya 3 unit sarana dan prasarana kantor (Laptop, gorden, meja kursi tamu)	Kab.Banjarnegara	3 unit , meja kursi tamu ruang kepala, pembelian gorden kantor untuk laptop kepala	Terpenuhinya 3 unit sarana dan prasarana kantor (Laptop, gorden, meja kursi tamu)	57,000,000	APBD II		3 unit	62,000,000	
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumah Laporan penyediaan jsa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/peneranag bangunan kantor yang dibayarkan	Kab.Banjarnegara	12 bl	Jumlah komponen instalasi listrik/pener anag	15,000,000	DAPBD II		12 bl	15,000,000	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terbayarnya honor PTT/THL	Kab.Banjarnegara	13 lap	Terbayarnya honor PTT/THL	100,615,780	APBD II		13 lap	102.615.780	
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kendaraan dinas yang dipelihara dengan baik	Kab.Banjarnegara	8 unit	Kendaraan dinas yang dipelihara dengan baik	25,000,000	DAU		8 unit	17,000,000	
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpeliharnya peralatan gedung kantor	Kab.Banjarnegara	24 unit	Terpeliharnya peralatan gedung kantor	22,000,000	DAU		24 unitn	15,000,000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangannya Kabupaten Banjarnegara. yang akan dilaksanakan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** meliputi kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan .
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan umum
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, meliputi sub kegiatan.
 - Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah meliputi.

- Penediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, meliputi kegiatan:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan Karakter Kebangsaan.meliputi sub kegiatan:
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.(Bela Negara)

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik meliputi kegiatan: meliputi kegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Meliputi 4 sub kegiatan yaitu:
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah; (Bantuan Hibah Parpol)
 - Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; (Koordinasi forum politik/dikpol)
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.(Verifikasi dan penelitian banpol)

-

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, meliputi kegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dengan 2 sub kegiatan yaitu
 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.(Hibah ormas
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.(Fasilitasi Ormas.)

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, meliputi kegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan 2 sub kegiatan yaitu
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;(Penyuluhan Narkoba).
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.(Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama/FKUB)

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial meliputi kegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Dengan 4 sub kegiatan yaitu
 - Penyusunan Program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; (FKDM)
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; (konflik)
 - Penuunan bahan perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; (Pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat (kominda))
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Forkopimda)

BAB V

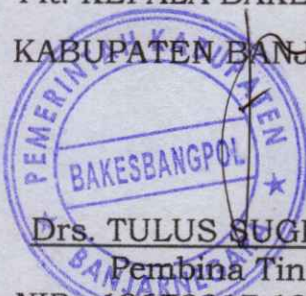
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal : 20 Juli 2023

Plt. KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. TULUS SUGIHARTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670217 199303 1 101



RENJA RENCANA KERJA

KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KABUPATEN BANJARNEGARA**

Jl. Selamanik No. 29 Banjarnegara
Telp. (0286) 591812 Fax. (0286) 591812

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud Dan Tujuan6

1.4 Sistematika Penulisan.....7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2022..... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara.9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Banjarnegara.....27

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....37

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 39

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional39

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Tahun 202442

3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 202443

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH47

BAB V PENUTUP..... 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan 11

Tabel 2. 2 Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan 14

Tabel 2. 3 Faktor - faktor penyebab melebihi target kinerja tahun 2022
..... 14

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten
Banjarnegara..... 18

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah 20

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Banjarnegara 32

Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara 37

Tabel 2. 8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara 38

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020 -2024..... 39

Tabel 3. 2 Prioritas Nasional 41

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025 48

Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang

diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 No. 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Urusan Pemerintah Bidang Keteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp. 5.519.804.166-, Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Pada tahap pra bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan;
2. Saat terjadi bencana meliputi kedaruratan dan logistik;
3. Pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari 2 program, 10 kegiatan, dan 23 sub kegiatan yang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 2 program, 9 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.189.804.166-,

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 2 program, 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan, walaupun bertambah satu sub kegiatan, namun ada satu sub kegiatan yang dihapus yaitu Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dikarenakan anggarannya tidak mencukupi sehingga dialihkan untuk kegiatan lainnya, oleh karena itu jumlah sub kegiatnnya tetap yaitu 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.519.804.166,- bertambah sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapat tambahan sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)
2. Program Penanggulangan Bencana bertambah sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pelaksanaan dan Kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (tidak ada yang tidak tercapai);

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel 2. 1 Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang memenuhi target kinerja tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisas i Renja Perangk at Daerah	Tingkat Realisa si (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	26 orang	26 orang	100%
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan yang terbayar	7 orang	7 orang	100%
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	12 paket	12 paket	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				
6.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan Mesin yang tersedia	8 paket	8 Paket	100 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasaa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	3 paket	3 paket	100%
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi yang terbayar	17 orang	17 orang	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	21 unit	21 unit	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisas i Renja Perangk at Daerah	Tingkat Realisa si (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya jumlah pajak kendaraan diasn/operasional	21 unit	23 unit	109,52 %
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpeliharaan	3 paket	3 paket	100%
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 paket	2 paket	100%
ROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					
13	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	5 desa	5 desa	100%
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
14	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10 desa	14 desa	140%
15	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	120 orang	120 orang	100%
16	Sub Kegiatan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 paket	1 paket	100%
17	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Jumlah warga negara termasuk		180 orang	

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisas i Renja Perangk at Daerah	Tingkat Realisa si (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bencana Kabupaten/Kota	kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	180 orang		100%
18	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	14 orang	14 orang	100%
19	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana		3 desa	3 desa	100%
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
20	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 paket	2 paket	100%
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
21	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 regulasi	1 regulasi	100%
22	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	10 dokumen	13 dokumen	100%

3. Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan di tahun 2022;

Tabel 2. 2 Realisasi program/kegiatan/sub-kegiatan yang melebihi target kinerja tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dibayarkan pajaknya	20	23	109,52 %
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
2	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10 desa	14 desa	140%
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
3	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	10 dokumen	13 dokumen	100%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan di Tahun 2022;

Tabel 2. 3 Faktor - faktor penyebab melebihi target kinerja tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			
			Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Faktor penyebab melebihi target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang	20	23	109,52 %	Terdapat 2 kendaraan dinas Milik BNPB yang dibalik nama

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			
			Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Faktor penyebab melebihi target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan pajaknya				kepemilikannya menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan telah dibayarkan pajaknya
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
2	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10 desa	14 desa	140%	Peran serta pemerintah desa dan pemerintah provinsi dalam mengalokasikan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara.
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
3	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	10 dokumen	13 dokumen	130%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 telah mencapai 100% namun dikarenakan Kabupaten Banjarnegara memiliki risiko bencana yang kompleks, maka sosialisasi, komunikasi dan edukasi serta pelatihan kebencanaan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Disamping itu perlunya penyadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk hidup harmonis dengan bencana sehingga perlu adanya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar apabila terjadi bencana tidak menimbulkan korban jiwa.

Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Banjarnegara telah berusaha secara maksimal dengan personil yang ada untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana melalui pelayanan pencarian dan evakuasi korban bencana, bantuan logistik serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dalam hal pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana BPBD Kabupaten Banjarnegara terus berupaya untuk melakukan pelayanan pasca bencana melalui kerjasama antar lembaga dan perjanjian kerja sama dalam penanggulangan bencana.

Analisis kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, BPBD Kabupaten Banjarnegara mengampu 2 (dua) Indikator. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja BPBD pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Indikator persentase Desa Tangguh Bencana dengan target 52,63%, tercapai 86,72%. Perhitungan ini berdasarkan pada jumlah daerah rawan bencana dengan risiko sedang sampai dengan tinggi (Target Renstra 102 desa). Jumlah Desa Tangguh Bencana yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2022 adalah 89 Desa sehingga rumus perhitungannya adalah jumlah desa yang telah terbentuk destana dibagi target restra dikalikan 100 atau $89 \text{ desa} / 102 \text{ desa} \times 100 = 52,63 \%$. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh Desa-desa yang mengalokasikan anggaran Pembentukan dan Pelatihan Desa Tangguh Bencana melalui APBDes. Adapun Kegiatan yang mendukung indikator tersebut adalah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan .
2. Indikator persentase bencana yang tertangani dengan baik dengan target 100% tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah kejadian bencana yang tertangani dibagi jumlah kejadian bencana (jumlah bencana yang tertangani adalah 425 kali dibagi dengan jumlah kejadian bencana 425 kali). Capaian 100% keberhasilan indikator ini didukung oleh Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.

Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Desa Tangguh Bencana			41,05%	52,63%	0	0	31,79%	38,97%	52,63%	0	
2	Persentase Bencana yang Tertangani dengan Baik			100%	100%	0	0	100%	100%	100%	0	
3	Nilai IKM/ SKM			79	79	80	80,50	83,53	84,05	79,50	84,08	
4	Nilai AKIP			CC (60)	CC (60)	60	60,50	CC (58,78)	59,95	CC (60)	B	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara Indonesia yang memperoleh layanan informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	0	0,35%	0,43%	0,51%	0	0	52,63%	0,43%	
2	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	0	27,33%	34,53%	41,72%	0	0	27,33%	34,43%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
			terhadap bencana.									
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

**Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Per.angkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah									
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	6 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	27 orang	27 orang	26 orang	26 orang	100%	26 orang		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan yang terbayar	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	100%	12 dokumen		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	12 laporan		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah									
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	60 orang	0	0	0	0	26 orang		

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		beserta Kelengkapannya								
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	12 laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi yang terbayar	17 orang	17 orang	17 orang	17 orang	100%	17 orang		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	21 unit	21 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya jumlah pajak kendaraan dinas/operasional	21 unit	21 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpeliharaan	1 paket	1 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	3 paket	3 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah warga negara	1000 orang	5 desa	5 desa	5 desa	100%	15 desa		

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana	termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun								
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	20 desa	10 desa	10 desa	14 desa	140%	12 desa		
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas	150 orang	0	0	0	0	60 orang		

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Teknis dan Manajerialnya								
	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 orang	125 orang	210 orang	210 orang	100%	250 orang		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 dokumen	0	0	0		1 dokumen		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 paket	0	0	0				
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	200 orang	120 orang	200 orang	200 orang	100%	230 orang		

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana								
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 paket	14 orang	14 orang	14 orang	100%	12 dokumen		
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	1 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen		

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Dokumen Laporan Kaji Cepa								
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket		
	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen		
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	10 PKS	0	10 Lembaga	10 lembaga	100%	10 dokumen		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Banjarnegara

BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) urusan, yaitu Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Sesuai dengan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hampir semua jenis bencana alam mengancam wilayah Kabupaten Banjarnegara kecuali tsunami. Adapun potensi bencana yang mengancam wilayah Kabupaten Banjarnegara ada 8 (delapan) jenis bencana alam, yaitu:

1. Tanah Longsor;
2. Gempa Bumi;
3. Angin Kencang;
4. Banjir;
5. Gas Beracun;
6. Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Kekeringan;
8. Banjir Bandang.

Dari 278 Desa/Kelurahan di Kabupaten Banjarnegara, 199 desa diantaranya memiliki risiko tinggi terjadi bencana tanah longsor.

2. Di Kabupaten Banjarnegara setiap tahun terjadi bencana, terutama bencana tanah longsor di hampir seluruh wilayah Kecamatan, namun sumber daya manusia yang kompeten serta peralatan kebencanaan yang ada relatif terbatas;
3. Masih banyak desa yang memiliki risiko tinggi terjadinya bencana tanah longsor yang belum terbentuk Desa Tangguh Bencana (Destana);
4. Sistem peringatan dini menjadi kunci dalam memitigasi dampak bencana sedangkan alat *early warning system* (EWS) yang terpasang masih sangat terbatas;

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada kemampuan dan kinerja BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam menghadapi bencana. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut antara lain meliputi:

1. Tidak Efektifnya Penanganan Bencana, BPBD menghadapi kendala dalam perencanaan, koordinasi, atau pengelolaan sumber daya, penanganan bencana menjadi kurang efektif. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam tanggap darurat, kurangnya dukungan medis dan logistik, dan kesulitan dalam evakuasi dan penyelamatan korban;
2. Kurangnya pengembangan kapasitas SDM dapat berdampak pada keterampilan dan pengetahuan petugas BPBD dalam menangani bencana. Kurangnya keterampilan teknis dan keahlian dapat mempengaruhi kualitas respons dan pemulihan pasca bencana.
3. Desa yang belum terbentuk menjadi desa tangguh bencana memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang cukup tentang risiko bencana, sehingga mereka lebih rentan terhadap risiko bencana.

4. Sistem Peringatan dini yang terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menimbulkan dampak korban jiwa dan kerugian material yang tinggi akibat bencana karena masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri sejak awal terjadinya bencana.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan penyediaan produk layanan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Tantangan dalam penanganan bencana antara lain :
 - a. Luas wilayah dan banyaknya jenis bencana yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan terjadi setiap tahun. Bencana sering terjadi tanpa peringatan dan sulit diprediksi. Hal ini mengharuskan Perangkat Daerah yang menangani dan masyarakat harus selalu meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
 - b. Tuntutan peningkatan kualitas layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta kedaruratan dan logistik
 - c. Terbatasnya peralatan penanggulangan bencana.

2. Peluang dalam penanganan bencana antara lain :
 - a. Banyaknya potensi relawan yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Banjarnegara sehingga sangat membantu BPBD dalam penanganan bencana. kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - b. Adanya Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana untuk meningkatkan keterampilan dalam penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan oleh BNPB maupun lembaga lain. Disamping itu juga adanya pengembangan dan penerapan sistem peringatan dini yang lebih akurat dan terintegrasi sehingga masyarakat mendapatkan informasi bencana dengan lebih cepat dan tepat.
 - c. Adanya Kolaborasi yang baik antar Pentahelix penanggulangan Bencana yaitu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media dalam Penanggulangan Bencana dan bantuan peralatan dari BNPB.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. BPBD Kabupaten Banjarnegara menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko

bencana di Kabupaten Banjarnegara. Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana, sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi risiko bencana.

2. Kolaborasi dan koordinasi antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah merupakan hal penting dalam penanganan bencana. BPBD bekerja sama dengan instansi terkait, TNI, POLRI, relawan, dan sektor swasta, untuk memastikan tanggap darurat yang efektif dan terintegrasi.
3. Partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana dan tanggap darurat penting untuk kesuksesan penanganan bencana. Perlu memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana.
4. Pengembangan sumber daya manusia BPBD merupakan hal penting agar petugas dapat menghadapi berbagai jenis bencana dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Jumlah usulan dalam Rencana Awal RKPD tahun 2024 adalah Rp. 10.600.000.000,-, usulan hasil review terhadap RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dok	3.250.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Banjarnegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dok	3.250.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	3.569.853.464	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Banjarnegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	3.569.853.464	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 dok	52.530.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 dok	52.530.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	3.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Banjarnegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	3.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Banjarnegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 paket	34.668.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Banjarnegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 paket	34.668.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	19.303.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	19.303.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	686.266.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD Banjarnegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	686.266.400	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD Banjarnegara	Jumlah unit Peralatan dan Mesin yang tersedia	20 unit	126.842.500		BPBD Banjarnegara	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin yang tersedia	20 unit	126.842.500	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	82.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	82.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 laporan	323.840.536	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Banjarnegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 laporan	323.840.536	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	10.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	155.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	155.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	37.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD Banjarnegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	37.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	BPBD Banjarnegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	65.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Banjarnegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	65.000.000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (Badan	Banjarnegara	Jumlah warga negara yang Mendapatkan Sosialisasi, omunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka	1000 orang	250.000.000	Program Penanggulangan Bencana/Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1000 orang	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanggulangan Bencana Daerah)		kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Banjarnegara	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 orang	200.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 orang	200.000.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2 laporan	533.256.400	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2 laporan	533.256.400	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Banjarnegara	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 unit	1.110.733.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Banjarnegara	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 unit	1.110.733.000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Banjarnegara	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	20 kawasan	550.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Banjarnegara	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	20 kawasan	550.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150 orang	183.025.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Banjarnegara	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150 orang	183.025.000	
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	450.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Penyusunan Rencana Kontinjensi	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	450.000.000	
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Banjarnegara	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 orang	150.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Banjarnegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	250 orang	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 dokumen	139.900.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 dokumen	139.900.000	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Banjarnegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 keluarga	100.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Banjarnegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 keluarga	100.000.000	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Banjarnegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	309.641.600	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Banjarnegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	309.641.600	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Banjarnegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	186.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Banjarnegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	186.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Banjarnegara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	NA	362.985.100	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Banjarnegara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	NA	362.985.100	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Banjarnegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12 laporan	29.980.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Banjarnegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12 laporan	29.980.000	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Banjarnegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dokumen	34.625.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/ Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Banjarnegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dokumen	34.625.000	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5 dokumen	100.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Banjarnegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5 dokumen	100.000.000	
	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana	Banjarnegara	Jumlah Penyelesaian kegiatan Pasca Bencana di semua sector sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	7 kegiatan	150.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Banjarnegara	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	7 kegiatan	150.000.000	
	JUMLAH				10.600.000.000						

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANJARNEGARA

ARIS SUDARYANTO, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198405 1 007

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegaha dan Kesiapsiagaan	Desa Prigi Kecamatan Sigaluh	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 paket	Pembentukan DESTANA
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa	Jumlah warga negara yang Mendapatkan Sosialisasi, omunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1 paket	Sosialisasi

2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kecamatan Pagentan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas sesuai dengan Ancaman Bencana di Kawasan tempat tinggalnya	1 paket	SARPRAS untuk BAGANA Kec. Pagentan
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kecamatan wanayasa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kab/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 paket	Pelatihan FPRB Kec. Wanayasa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan peraturan yang mengatur upaya-upaya dalam menanggulangi bencana di Indonesia. UU No. 24 Tahun 2007 ini menjadi dasar hukum bagi upaya penanggulangan bencana di Indonesia dan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk merespons bencana secara lebih efektif.

Berdasarkan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi BNPB yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB. Adapun arahan kebijakan dan strategis BNPB Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020 -2024

Arah Kebijakan	Strategi
1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif	Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, Lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana
3. Peningkatan layanan darurat	Penguatan koordinasi dan komando

Arah Kebijakan	Strategi
bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.	penanganan darurat.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.	Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah merupakan implementasi dari arahan dan kerangka kerja yang ditetapkan oleh kebijakan nasional dan provinsi. Kebijakan nasional, yang diwakili oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RNPB), memberikan panduan strategis yang mengatur upaya penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Selain itu, kebijakan provinsi menyediakan arahan dan rencana aksi yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana di wilayah provinsi masing-masing.

Dalam menghadapi bencana, pemerintah daerah merumuskan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) sebagai pedoman dalam menyusun strategi mitigasi, pencegahan, dan respons tanggap darurat. RPBD mengacu pada RNPB dan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi (RPBP) untuk memastikan sinergi dan keselarasan dalam langkah-langkah yang diambil.

Kebijakan penanggulangan bencana daerah memungkinkan adaptasi yang lebih mendalam dengan

mempertimbangkan potensi risiko bencana dan kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait di tingkat daerah menjadi faktor kunci dalam berhasilnya kebijakan ini. Dengan demikian, kolaborasi antara kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional, provinsi, dan daerah menjadi landasan yang kokoh dalam melindungi masyarakat, aset, dan lingkungan dari dampak bencana serta membangun ketahanan komunitas dalam menghadapi ancaman alam yang tidak terhindarkan.

Tabel 3. 2 Prioritas Nasional

Prioritas Nasional
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Tahun 2024

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung Misi ke satu RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 – 2025 yaitu : "Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat". Tujuan yang akan dicapai pada misi ke satu adalah Meningkatnya Kondusivitas Wilayah, dengan sasaran ke dua yaitu "Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana". Dengan indikator kinerja sasaran adalah "persentase desa tangguh bencana".

Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		
2	Meningkatkan Pemerintah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
3	Meningkatkan Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,51%	0,59%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	41,72%	48,92%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan kedaruratan bencana	100%	100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana	100%	100%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub-kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD.
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub-kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub-kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub-kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penanggulangan Bencana
 - 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota

- a. Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencan Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana).
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - a. Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. Sub-kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - d. Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 - e. Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - f. Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi;
 - g. Sub-kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - h. Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - i. Sub-kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana;
 - j. Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a. Sub-kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;

- b. Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - c. Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota;
 - d. Sub-kegiatan Respon cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit;
 - e. Sub-kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- a. Sub-kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. Sub-kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
 - c. Sub-kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Untuk rincian daftar usulan program/kegiatan/sub-kegiatan Renja BPBD beserta anggarannya pada tahun 2024 tercantum dalam Bab IV pada tabel TC-33.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program/kegiatan dengan anggaran merupakan bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana. Untuk mencapai sasaran-sasaran penanggulangan bencana, perlu dilakukan alokasi dana yang tepat untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang relevan. Program penanggulangan bencana mencakup berbagai aspek, seperti mitigasi risiko, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan rehabilitasi pasca-bencana.

Dalam perumusan program dan kegiatan yang efektif berdasarkan beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat. Perumusan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kegiatan yang berbasis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan strategis dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam hal ini IKU BPBD yaitu Meningkatkan Layanan Penanggulangan Bencana dalam menghadapi ancaman bencana serta pengurangan risiko bencana dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA);
2. Mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perumusan program dan kegiatan menjadi langkah krusial dalam mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah. Dengan mengidentifikasi prioritas, sasaran, dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat, pemerintah daerah dapat merancang program dan kegiatan yang relevan dan berdampak positif.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						10.060.000.000,00							10.060.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.060.000.000,00							10.060.000.000,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.060.000.000,00							10.060.000.000,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			60.50 %	5.169.853.900,00						-	5.169.853.900,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			6 Dokumen	3.250.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Dokumen	-	3.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	3.250.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Dokumen		3.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang terpenuhi	-			100 %	3.625.383.464,00				Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Pegawai	-	3.625.383.464,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	3.569.853.464,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Pegawai		3.569.853.464,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	52.530.000,00	Kab. Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Pegawai		52.530.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Pegawai		3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	34.668.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pegawai	-	34.668.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	34.668.000,00	Kab. Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Pegawai		34.668.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	705.569.400,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Adminitrasi perkantoran yang terpenuhi	-	705.569.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.303.000,00	Kab. Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Adminitrasi perkantoran yang terpenuhi		19.303.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	686.266.400,00	Kab. Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Adminitrasi perkantoran yang terpenuhi		686.266.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	-			100 %	126.842.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	-	126.842.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	126.842.500,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah		126.842.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	-			100 %	406.640.536,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	-	406.640.536,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	82.800.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		82.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	323.840.536,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai		323.840.536,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	-			100 %	267.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	-	267.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	10.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	155.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah		155.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Barang Mliik Daerah		37.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	65.000.000,00	Kab. Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Barang Mliik Daerah		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penanggulangan bencana	-			100 %	4.890.146.100,00						-	4.890.146.100,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-			0.51 %	250.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjamegara	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				NA Dokumen	0,00	Kab. Banjamegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjamegara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>				1000 Orang	250.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	-			41.72 %	3.416.914.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara	-	3.416.914.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan														
			<i>Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>				20 Kawasan	550.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya</i>				150 Orang	183.025.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara		183.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi</i>				1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				250 Orang	150.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	139.900.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara		139.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				NA Dokumen	0,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1 Unit	1.110.733.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara		1.110.733.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				200 Kawasan	200.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarnegara		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>				2 laporan	533.256.400,00	Kab. Banjarmegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Banjarmegara		533.256.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Persentase warga negara yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi</i>	-			100 %	923.231.700,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat	-	923.231.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>				1 Dokumen	309.641.600,00	Kab. Banjarmegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat		309.641.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>				100 Orang	186.000.000,00	Kab. Banjarmegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat		186.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				NA Orang	362.985.100,00	Kab. Banjarmegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat		362.985.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit														
			<i>Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu</i>				1 Dokumen	34.625.000,00	Kab. Banjarmegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat		34.625.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	29.980.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat		29.980.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>Persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah</i>	-			100 %	300.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Dokumen	-	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Dokumen		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Dokumen		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan</i>				7 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Dokumen		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	J U M L A H							10.060.000.000,00							10.060.000.000,00		

BAB V

PENUTUP

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat melangkah maju dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Sebagai langkah strategis dalam mewujudkan hal tersebut, kami dengan penuh semangat menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara untuk periode tahun 2024.

Rencana Kerja BPBD (Renja BPBD) menjadi landasan penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam upaya mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, dan meminimalkan dampak negatif dari bencana yang mungkin terjadi. Renja BPBD akan menjadi panduan utama bagi seluruh anggota BPBD, pihak terkait, dan masyarakat dalam menyikapi situasi bencana dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa tantangan penanggulangan bencana semakin kompleks dan beragam, oleh karena itu, keterlibatan aktif dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, sangat kami harapkan agar tujuan mulia ini dapat tercapai dengan maksimal.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja BPBD ini. Semoga langkah kita dalam menyusun rencana kerja ini menjadi pijakan kokoh dalam menghadapi bencana dan memberikan perlindungan serta keselamatan bagi seluruh warga Kabupaten Banjarnegara.

Salam tangguh dan semangat penanggulangan bencana!

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Agustus 2023
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

ARIS SUDARYANTO, S.Pd.M.Pd
NIP. 19640825 198405 1 006